

# Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
a. Gambaran Umum Organisasi .....	3
b. Tugas dan Fungsi.....	4
c. Isu Strategis yang dihadapi .....	10
d. Dasar Hukum .....	11
e. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020 .....	13
a. Perencanaan Strategi .....	12
b. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	21
c. Perjanjian Kinerja (PK) .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020.....	25
a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	25
b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 .....	26
1. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .....	26
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator .....	26
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator .....	27
c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja.....	27
d. Kerja nyata v.s Tahun Sebelumnya.....	30
e. Kinerja Nyata dengan Akhir Tahun Berjalan .....	30
f. Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lainnya .....	31
g. Output program/ kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/ Kegagalan program/ kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja .....	31
h. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran.....	32
i. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran .....	32
j. Solusi/ rekomendasi/ tindaklanjut untuk pencapaian kinerja sasaran .....	32
2. Jumlah Jumlah Data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.....	33
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator .....	33
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator .....	33
c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja.....	34
d. Kerja nyata v.s Tahun Sebelumnya.....	39
e. Kinerja Nyata dengan Akhir Tahun Berjalan .....	39
f. Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lainnya .....	40
g. Output program/ kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/	

Kegagalan program/ kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja .....	40
h. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran.....	40
i. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran .....	41
j. Solusi/ rekomendasi/ tindaklanjut untuk pencapaian kinerja sasaran .....	41
3. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali .....	41
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator .....	41
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator .....	43
c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja.....	54
d. Kerja nyata v.s Tahun Sebelumnya.....	56
e. Kinerja Nyata dengan Akhir Tahun Berjalan .....	56
f. Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lainnya .....	57
g. Output program/ kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/ Kegagalan program/ kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja .....	57
h. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran.....	57
i. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran .....	58
j. Solusi/ rekomendasi/ tindaklanjut untuk pencapaian kinerja sasaran .....	59
4. Indeks Kepuasan Masyarakat .....	63
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator .....	63
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator .....	65
c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja.....	65
d. Kerja nyata v.s Tahun Sebelumnya.....	68
e. Kinerja Nyata dengan Akhir Tahun Berjalan .....	68
f. Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lainnya .....	69
g. Output program/ kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/ Kegagalan program/ kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja .....	69
h. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran.....	69
i. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran .....	70
j. Solusi/ rekomendasi/ tindaklanjut untuk pencapaian kinerja sasaran .....	70
BAB IV PENUTUP .....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun LKIP. Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **b. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik .

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika;
2. Pelaksanakan kebijakan lingkup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

**Sekretaris, membawahi:**

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub.Bagian Program
3. Sub. Bagian Keuangan

**Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya TIK :**

1. Seksi Perencanaan Kebijakan TIK
2. Seksi Evaluasi TIK
3. Seksi Pengembangan Sumberdaya TIK

**Bidang Infrastruktur TIK membawahi:**

1. Seksi Interkoneksi dan Jaringan;
2. Seksi Manajemen Perangkat keras TIK
3. Seksi Infrastruktur TIK untuk Publik

**Bidang Data dan Statistik, membawahi:**

1. Seksi Survey dan Akuisisi Data;
2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data;
3. Seksi Publikasi dan Data Terbuka

**Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, membawahi:**

1. Seksi Pengelolaan Aplikasi;
2. Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
3. Seksi Integrasi Sistem Informasi

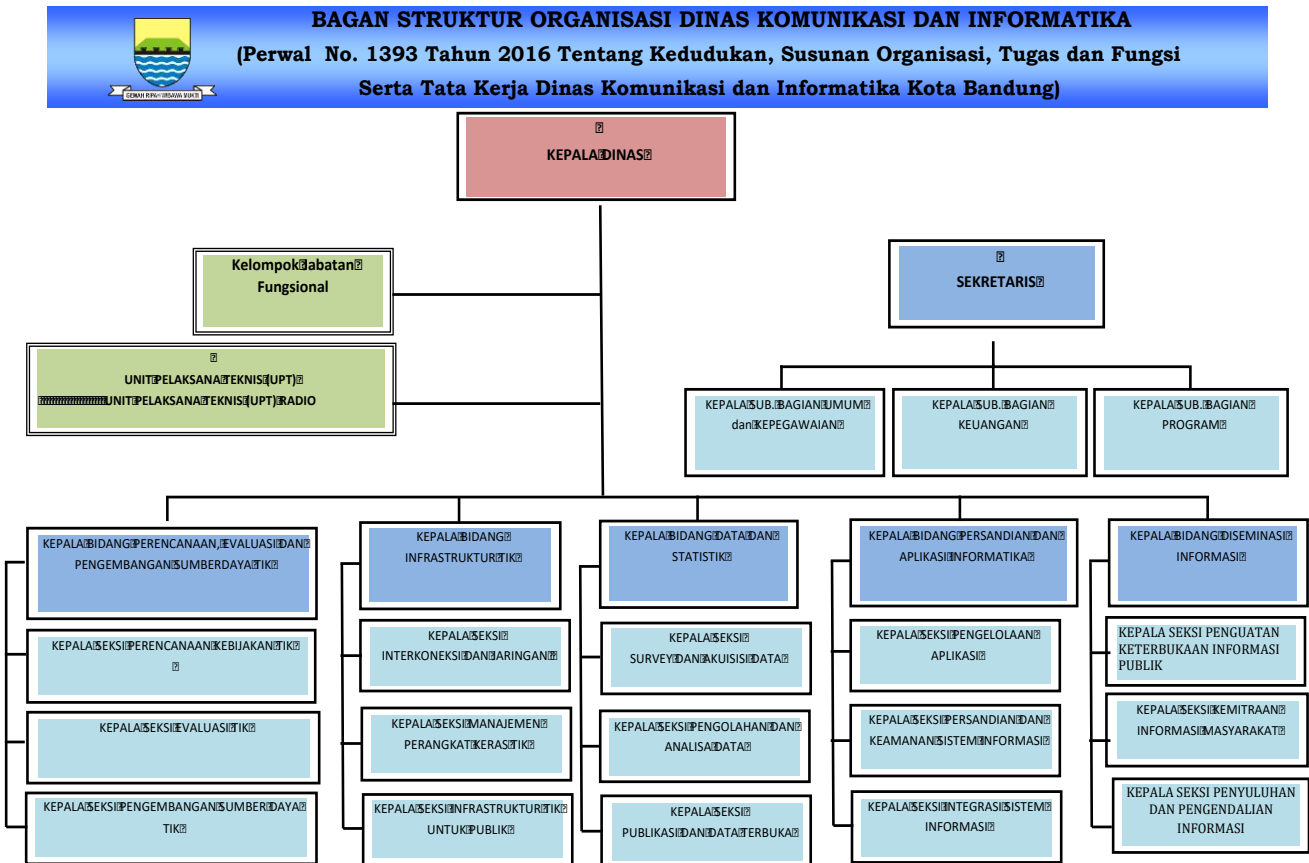
**Bidang Diseminasi Informasi**

1. Seksi Penguatan keterbukaan Informasi Publik
2. Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat
3. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi

# UPT Radio Sonata

## Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.



Gambar 1. Organogram Diskominfo Kota Bandung

## Kepegawaian

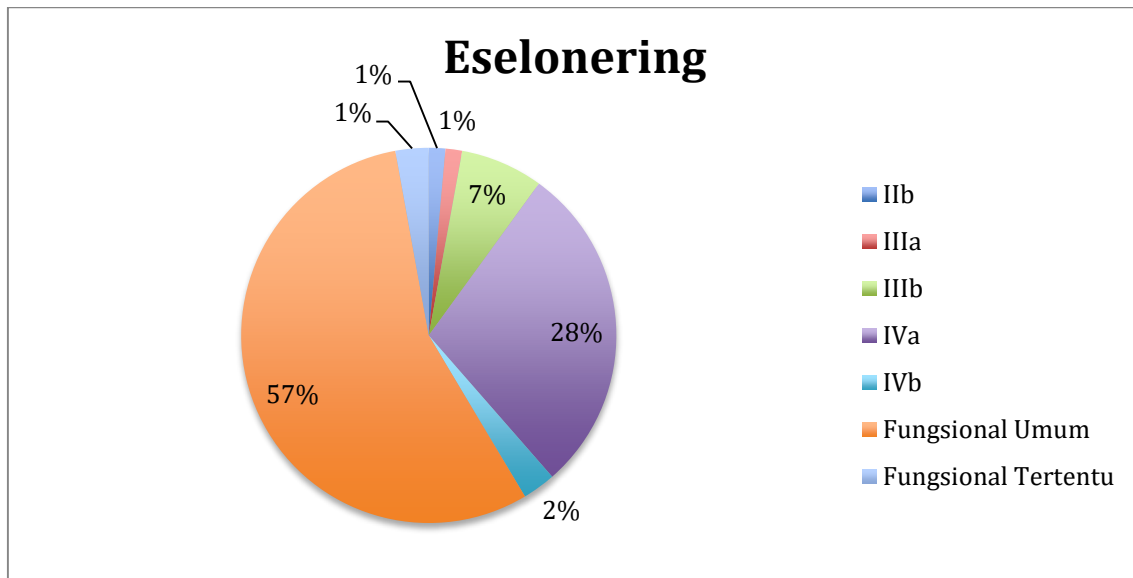
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 68 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 68 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 5 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 19 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, fungsional umum 39 orang serta fungsional tertentu sebanyak 2 orang.



TABEL 1. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

Eselon	Jumlah	Persentase
II.b	1	1.47%
III.a	1	1.47%
III.b	5	7.36%
IV.a	19	27,95%
IV.b	1	1,47%
Fungsional Umum	39	57.36%
Fungsional Tertentu	2	2.95%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 1.2.

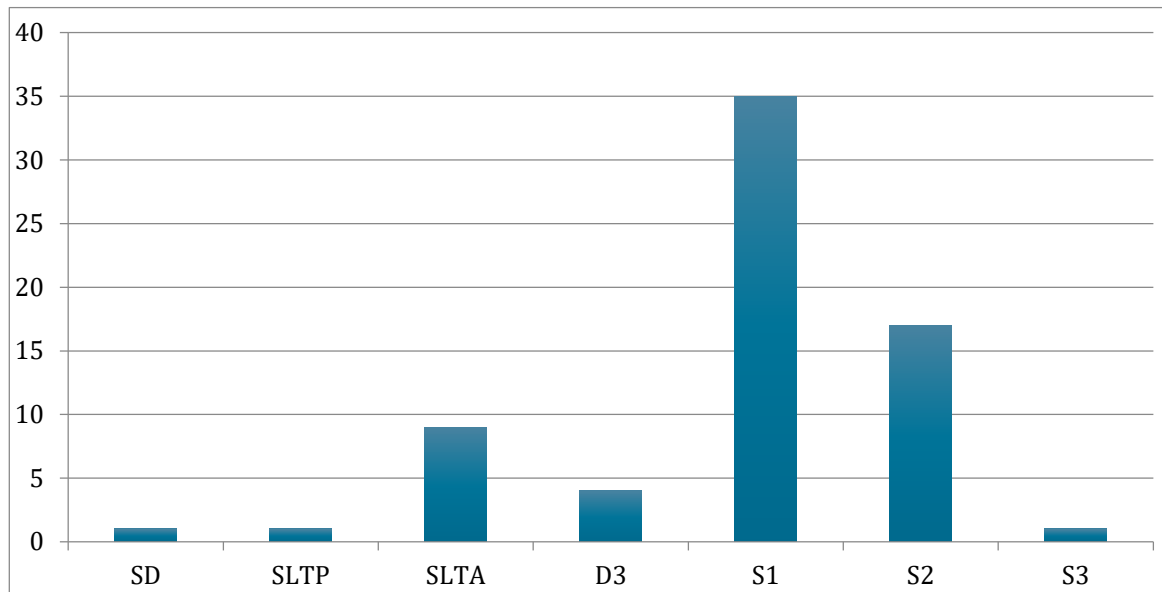
**TABEL 2. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN**

Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
SD	1	1,47%
SLTP	1	1,47%
SLTA	9	13,28%
D3	4	5,89%
S1	35	51,47%
S2	17	25,00%
S3	1	1,47%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



## BERDASARKAN PENDIDIKAN



Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 1 orang (1,47%) memiliki pendidikan S3, yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 17 orang (25,00%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 35 orang (51,47%), yang memiliki D3 sebanyak 4 orang (5,89%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 9 orang (13,28%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (1,47%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (1,47%).

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung.

### c. Isu Strategis yang Dihadapi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik, Diskominfo Kota Bandung dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2018-2023, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Bandung. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:



## d. Dasar Hukum

### **Dasar Hukum**

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung



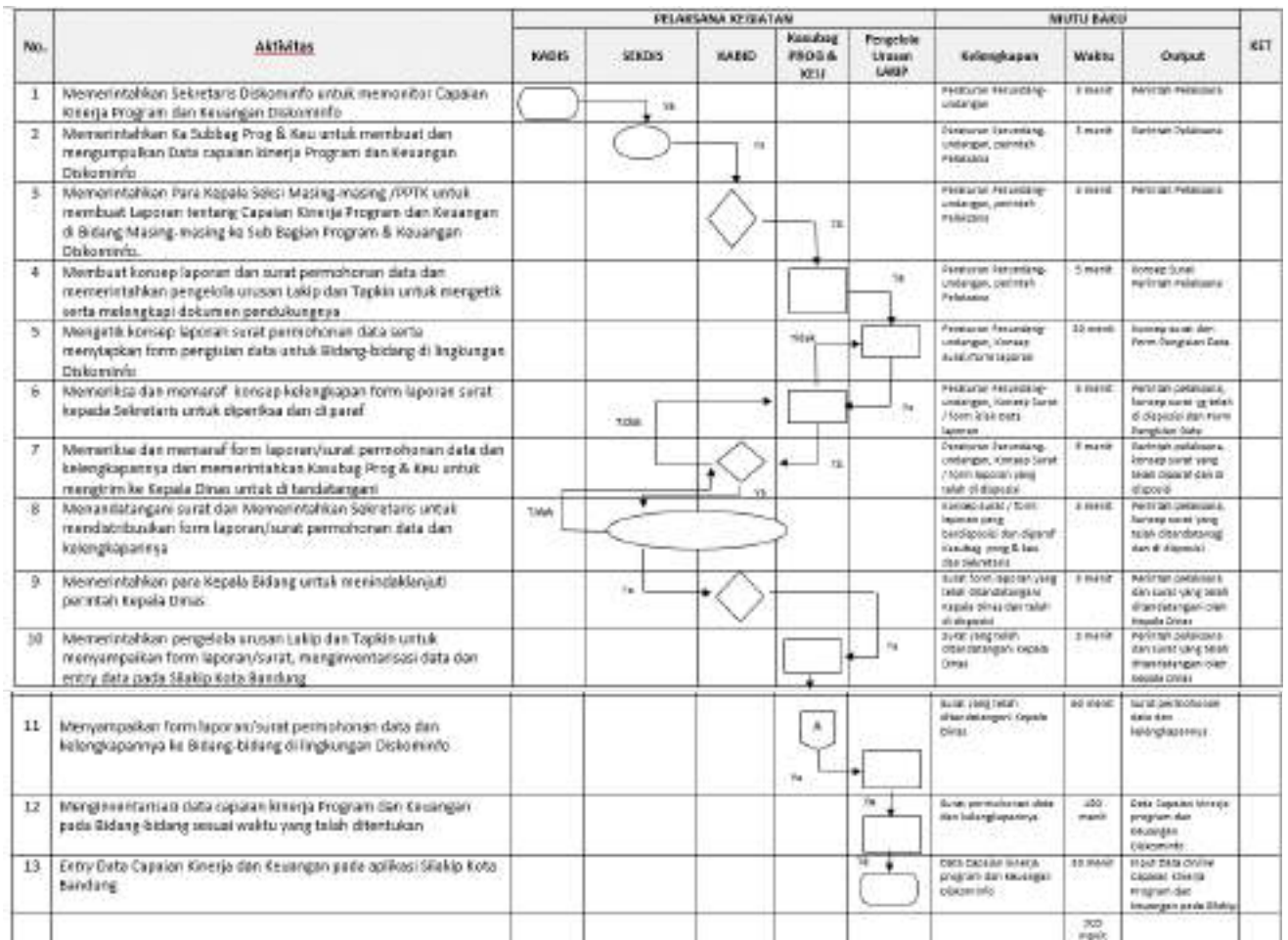
## e. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Yaitu;

<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	Meliputi; Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
<i>BAB II PERENCANAAN KINERJA</i>	Meliputi Perencanaan Strategis (sebelum dan setelah review), IKU dan Perjanjian Kinerja.
<i>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</i>	Meliputi; Capaian UKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
<i>BAB IV PENUTUP</i>	Kesimpulan dan Rekomendasi

## Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Diskominfo Kota Bandung menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja subag program di Diskominfo sebagai acuan. Dalam SOP ini tergambaran pihak-pihak yang terlibat, alur kerja serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan di review kemudian sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja Dinas.



Gambar 4 SOP Pengumpulan data LKIP Diskominfo

SOP di atas dijalankan secara efektif dalam 303 menit atau dalam 5 jam lebih 3 menit. Namun adalalkalanya dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih “mentah” dan kurang teradministrasi dengan baik, serta terbatasnya waktu dikarenakan aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif dijalankan. Kurang lebih dipelukan waktu satu minggu dalam waktu kerja untuk mengumpulkan seluruh keperluan, data, dan bahan-bahan dalam penyusunan LKIP Tahun 2020 ini.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### a. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja Diskominfo Kota Bandung didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2018-2023. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung karena disadari masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi dan informatika sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi dan informatika yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis Smart City telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di

seluruh Indonesia. Pembangunan Smart City tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan melalui visinya **"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS"**, sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan urusannya yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**TABEL 3.**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG**  
**DALAM RANGKA PENCAPAIAN VISI DAN MISI RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

NO	VISI (RPJMD)	MISI 2 (RPJMD)	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	TUJUAN (PD)	INDIKATOR (PD)	SASARAN (PD)	INDIKATOR (PD)
	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Terwujudnya Bandung Smart City	Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang berbasis e-government	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
							Terwujudnya Bandung Open Data	Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/ kredibel	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka
							Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian secara optimal	Prosentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian	Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali
						Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Hasil survei layanan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat

## Target dan Analisis Target Renstra 2018-2023

Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023 sebagaimana pada Tabel 4.

TABEL 4. TARGET RENSTRA 2018-2023

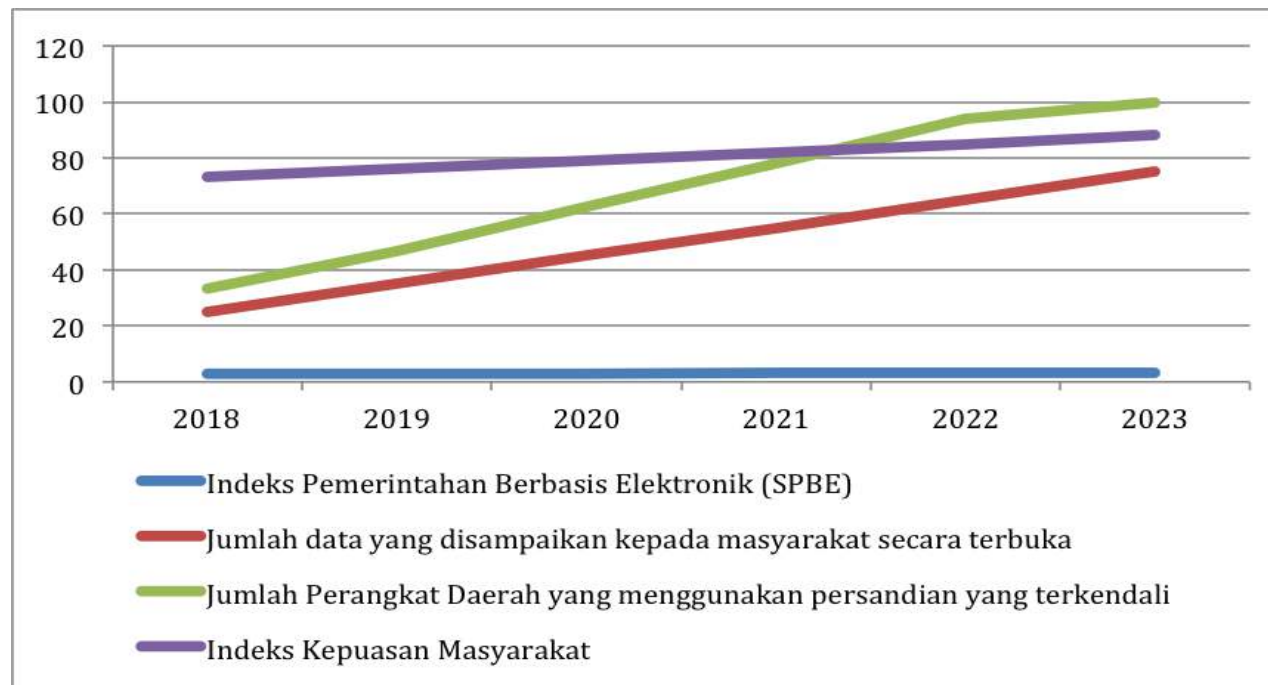
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal Periode RPJMD (2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Bandung Smart City		Level Kematangan Smart City	Integratif	Integratif	Integratif	Smart	Smart	Smart
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,9	3,0	3,01	3,02	3,3	3,4
2	Terwujudnya Bandung Open Data		Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat	25%	35%	45%	55%	65%	75%



		Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/kredibel	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	25%	35%	45%	55%	65%	75%
3	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian secara optimal		Prosentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian	33,33%	46,87%	62,50%	78,12%	93,75%	100%
		Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	33,33%	46,87%	62,50%	78,12%	93,75%	100%
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo		Hasil survai layanan Kepuasan Masyarakat	73	76	79	82	85	88,31
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	76	79	82	85	88,31

Jika dilihat dari perkembangan target pada Renstra Tahun 2018-2023 ditafsirkan sebagai target 100% kinerja pada akhir tahun Renstra ada 2 indikator yang menggunakan pengukuran prosentase dan 2 indikator yang menggunakan poin, maka kita dapat melihat peningkatan target renstra per-tahun pada Gambar 2.

GAMBAR 2. AKUMULASI PERSENTASE TARGET RENSTRA 2018-2023



### 3.1 Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementrian PANRB ini menjadi indikator sejauhmana pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkaulitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah.

### 3.2 Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka

Pelaksanaan indikator ini merupakan amanat dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Salah satu amanat dalam urusan statistik ini yaitu Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi. Hal ini data menjadi dasar informasi untuk bahan dalam menentukan suatu kebijakan serta data dapat menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi.

### 3.3 Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 seperti halnya urusan statistik, urusan persandian persandian juga menjadi salah satu indikatornya yaitu Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Peranan persandian dan keamanan informasi sebagai entitas pengaman informasi melalui penyelenggaraan persandian. Persandian harus mampu memberi jaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.

### 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini merupakan amanat dari Permen PANRB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima

pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

## b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur sejauhmana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus pada setiap tahunnya. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai pada Tahun 2020 yaitu;

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2020
1	Terwujudnya Bandung Smart City		Level Kematangan Smart City	Integratif
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE(Smart City)	3,01
2	Terwujudnya Bandung Open Data		Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat	45%

		Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/ kredibel	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	45%
3	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian secara optimal		Prosentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian	62,50%
		Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	62,50%
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo		Hasil survai layanan Kepuasan Masyarakat	79
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

### c. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah sebagai berikut;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,01

2	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/kredibel	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	Prosentase	45%
3	Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	Prosentase	62,50%
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79
5	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Diskominfo	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Prosentase	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	288.107.500	APBD
2	Program Diseminasi Informasi	1.267.378.700	APBD
3	Program Layanan Informasi Publik	691.630.100	APBD
4	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.138.359.800	APBD
5	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	561.494.660	APBD
6	Program Optimalisasi Persandian	105.700.000	APBD
7	Program Optimalisasi Aplikasi	4.301.398.000	APBD
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.123.244.700	APBD
9	Program Peningkatan Sarana dan	339.700.000	APBD

	Prasarana Aparatur		
10	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	85.442.500	APBD
11	Program Perlindungan Sosial Bencana	1.154.353.500	APBD





# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### a. Capaian IKU

Pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah menetapkan 4 sasaran dalam Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai, ke 4 sasaran tersebut diukur dengan menetapkan 4 indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**TABEL 5. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,01	3,78	125,59
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	Prosentase	45 (128 data)	45,23 (128 data)	100,52
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	Prosentase	62,50 (10 aplikasi)	62,50 (10 aplikasi)	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79	84,72	107,24

*Keterangan; IKU Dinas Komunikasi dan Informatika*

Dari tabel 5 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU yang mencerminkan keberhasilan rata-rata di atas 100% dari target yang ditetapkan. Dalam LKIP Tahun 2020, semua indikator adalah IKU (Indikator Kinerja Utama).

## b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

Pada bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

### 1. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart city)

#### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi yang ada di Pemerintah Kota Bandung.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung.

Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pedoman pada evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE dan

dukungan oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur suatu nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE. Adapun target pematangan level SPBE pada Tahun 2020 adalah Triwulan 1 (persiapan); Triwulan 2 (proses pelaksanaan pematangan SPBE); Triwulan 3 (proses pelaksanaan pematangan SPBE); dan Triwulan 4 (Level pematangan SPBE). Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

*Capaian indikator 1 = Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN RB RI*

Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB ini merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan SPBE ke depan untuk lebih baik lagi.

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Pada Tahun 2020, indikator “Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)” memiliki target 3,01 poin terealisasi poin 3,78 poin atau 125,59%. Dari target tersebut menggambarkan indikator tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan.

No	URAIAN	Rencana 2020	Realisasi 2020
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	3,01 poin	3,78 poin



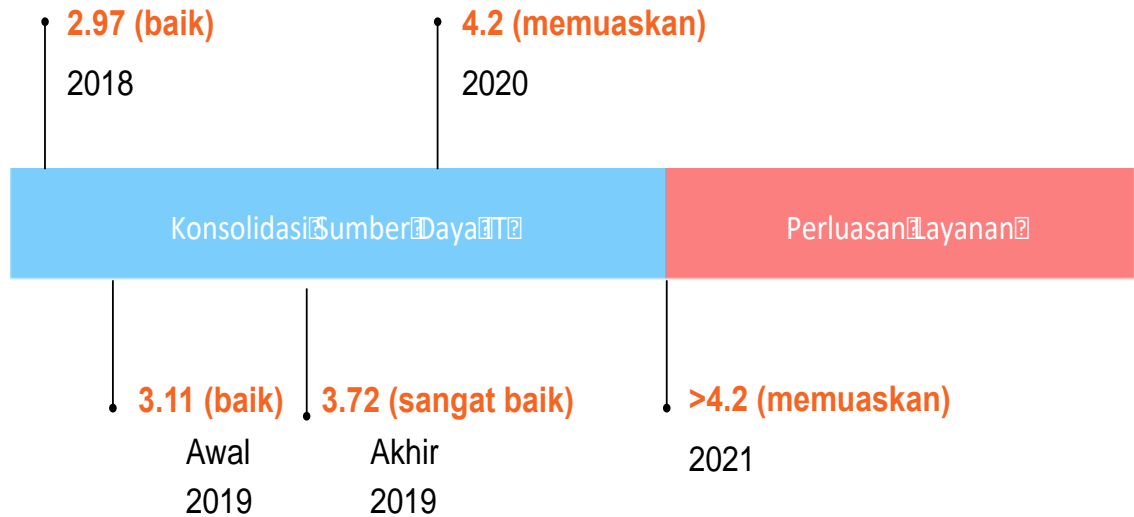
# SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK SPBE KOTA BANDUNG

Diskominfo Kota Bandung

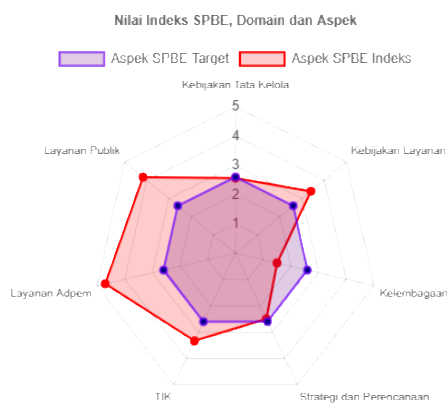
PM PANRB 59/2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.



# MILESTONES



## NILAI INDEKS SPBE KOTA BANDUNG TAHUN 2020



Nama Instansi	Pemerintah Kota Bandung
	2020
<b>Indeks SPBE</b>	<b>3.78</b>
Predikat SPBE	Sangat Baik
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>3.18</b>
□ Kebijakan Tata Kelola SPBE	2.57
□ Kebijakan Layanan SPBE	3.6
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2.71</b>
□ Kelembagaan	2
□ Strategi dan Perencanaan	2.5
□ TIK	3.33
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>4.52</b>
□ Administrasi Pemerintahan	4.71
□ Pelayanan Publik	4.17

## PERKEMBANGAN NILAI INDEKS SPBE KOTA BANDUNG

TAHUN 2018 S.D 2020

Nama Instansi	Pemerintah Kota Bandung		
	2020	2019	2018
<b>Indeks SPBE</b>	<b>3.78</b>	<b>3.72</b>	<b>3.11</b>
Predikat SPBE	Sangat Baik	Sangat Baik	baik
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>3.18</b>	<b>3.06</b>	<b>3</b>
□ Kebijakan Tata Kelola SPBE	2.57	2.57	2.86
□ Kebijakan Layanan SPBE	3.6	3.4	3.1
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2.71</b>	<b>2.57</b>	<b>2.57</b>
□ Kelembagaan	2	1.5	2
□ Strategi dan Perencanaan	2.5	2.5	2.5
□ TIK	3.33	3.33	3
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	<b>3.42</b>
□ Administrasi Pemerintahan	4.71	4.71	3.57
□ Pelayanan Publik	4.17	4.17	3.17

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Realisasi pada Tahun 2020 ini dibandingkan dengan Tahun 2019 , Patada Tahun 2019 memperoleh penilaian sebanyak 3,11 Poin dan pada Tahun 2020 memperoleh nilai sebanyak 3,78 poin atau 121,55% ;

No	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	3,11 poin	3,78 poin

#### e. Kinerja Nyata dengan Akhir Tahun Berjalan

Kinerja pada Tahun 2020 indikator “Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)” dengan akhir tahun berjalan, pada Tahun 2020 yaitu sebesar 3,78 poin bila dibandingkan dengan tahun berjalan sebesar 3,01 Poin atau 125,59%

No	URAIAN	TAHUN 2020 TW 4	AKHIR TAHUN 2020
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	3,78 poin	3,01 poin

f. **Perbandingan Kinerja Dengan Kinerja Instansi Lainnya**

Kinerja pada indikator “Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)” dengan kinerja instansi lainnya, tidak dapat disandingkan atau diperbandingkan dengan daerah lain karena tidak memiliki data yang akurat.

g. **Output program / kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja**

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah upaya untuk meningkatkan level pematangan smart city yang mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan di 1 Program, yaitu Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan terkait indikator “Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)” adalah Kegiatan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun demikian sasaran program ini didukung pula oleh program-program lain yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja Sebesar Rp.91.284.000,- di Triwulan 4 ini anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 82,691,500,- atau 90,59%.

#### h. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2020 ini diantaranya:

- ❖ Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
- ❖ Adanya komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam peningkatan level kematangan SPBE .
- ❖ Adanya dukungan dari perangkat daerah dalam menggunakan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### i. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- ❖ Belum optimalnya integrasi data dan aplikasi
- ❖ Belum optimalnya fungsi dewan smart city
- ❖ Belum optimalnya tingkat kepatuhan pengguna SPBE terhadap regulasi yang berlaku
- ❖ Belum memadainya anggaran SPBE
- ❖ Belum optimalnya fungsi koordinasi antar perangkat daerah
- ❖ Belum optimalnya kapasitas SDM TIK.

#### j. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Komitmen Perangkat Daerah untuk membantu dalam penyediaan akses ke database agar data dapat di integrasikan dengan aplikasi lainnya
- ❖ Komitmen Perangkat Daerah untuk menyediakan source code sehingga akan mempercepat tim dalam mengintegrasikan



aplikasi sebagai salah satu upaya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka**

### **a. Penjelasan umum sasaran dan indikator**

Data & Informasi Statistik Pembangunan sebagai One Stop Service dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan dan pembangunan, memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan hingga pada akhirnya dapat menghasilkan Analisa dan evaluasi guna mengukur kinerja dalam proses pembangunan.

Penyajian data atau informasi melalui portal data ini yang disampaikan kepada masyarakat, bukan hanya membantu pimpinan/pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini penting karena di era keterbukaan ini masyarakat harus mengetahui data informasi pembangunan baik yang akan, sedang maupun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Untuk memehuni kebutuhan data informasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dukungan dari data-data dinas/badan/bagian maupun lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berupaya menyajikan data sesuai aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

### **b. Instrumen/ cara perhitungan indikator**

Target yang digunakan indikator ini adalah Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui portal data berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Capaian indikator 2

$$= \frac{\text{Jumlah Data berdasarkan Permendagri No. 86 Th. 2017 yang dipublikasi di Portal Data}}{\text{Jumlah data yang seharusnya tersedia berdasarkan Permendagri No. 86 Th. 2017}} \times 100\%$$

### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Pada Tahun 2020 dari target 128 data berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 atau target 45 % jumlah data yang sudah diverifikasi terealisasi sebanyak 128 data atau 45,23 % data yang sudah diverifikasi dari jumlah data menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sebanyak 283 data. Capaian indikator kerja nyata terhadap indikator target Renstra Diskominfo didapat ;  $128/128 = 100\%$  (**memenuhi target Renstra Diskominfo Tahun 2020**).

No	URAIAN	Rencana 2020	Realisasi 2020
1	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	45% (128 data)	45,23% (128 data)

Capaian indikator kinerja Tahun 2020 dalam menyampaikan informasi yang disampaikan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut;

### LAPORAN TAHUN 2020 DATA PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 YANG DIPUBLIKASI DI PORTAL DATA

NO	PERANGKAT DAERAH	JML DATA MENURUT PERMENDAGRI 86/2017	JML DATA MENURUT PERMENDAGRI 86/2017 YG SUDAH DIPUBLIKASI DI PORTAL DATA	JUDUL DATA
1	Dinas Kesehatan	37	26	Jumlah Kematian Bayi (Umur < 1 Tahun)
				Jumlah Bayi Lahir Hidup

				Jumlah Kematian Balita (Umur < 5 Tahun)
				Jumlah Kematian Bayi (Umur < 1Bulan)
				Jumlah Kematian Ibu Hamil, Bersalin Dan Nifas
				Jumlah Posyandu
				Jumlah Puskesmas
				Jumlah Tenaga Medis
				Jumlah Anak Usia 1 Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak
				Jumlah Penderita Pneumonia Balita
				Jumlah Penderita Baru TBC BTA
				Jumlah Kasus Tbc (baru + lama)
				Jumlah Penderita Dbd
				Jumlah Penderita Diare
				Jumlah Pasien HIV/AIDS
				Jumlah Kunjungan Pasien Miskin Di Sarana Kesehatan
				Jumlah Rumah Sakit
				Jumlah Pasien Tb Yang Meninggal
				Jumlah Pasien Tb Yang Mendapat Pengobatan
				Jumlah Pasien Tb Yang Sembuh
				Jumlah Balita Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan
				Jumlah Kasus Malaria
				Jumlah Kematian Akibat Malaria
				Jumlah Bayi Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan
				Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan
				Jumlah Ibu Nifas Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan
2	Dinas Pendidikan	27	22	Jumlah Siswa SD/MI
				Jumlah Siswa SMP/MTS
				Jumlah Siswa SMA/MA/SMK
				Jumlah Siswa Lulus Sekolah Dasar
				Jumlah Siswa Lulus Sekolah Menengah Pertama
				Jumlah Siswa Lulus Sekolah Menengah Atas
				Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMP
				Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMA
				Jumlah Sekolah Dengan Kondisi Bangunan Baik
				Jumlah SD Di Kota Bandung
				Jumlah SMP di Kota Bandung
				Jumlah SMA di Kota Bandung
				Jumlah SD Dengan Kondisi Bangunan Baik
				Jumlah SMP Dengan Kondisi Bangunan Baik
				Jumlah Guru SD
				Jumlah Guru SMP

				Jumlah Guru SMA
				Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D4
				Jumlah Siswa TK
				Jumlah Guru SD
				Jumlah Guru SMP
				Jumlah Guru SMA
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	6	Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun Yang Mempunyai KTP
				Jumlah Penduduk Usia >= 17 Tahun
				Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran
				Jumlah Penduduk Usia 0-1 Tahun
				Jumlah Penduduk Yang Berstatus Kawin
				Jumlah Pasangan Yang Memiliki Akte Nikah
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6	6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil
				Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
				Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
				Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah
				Jumlah Pegawai Yang Mendapat Pelatihan Formal
				Jumlah Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	7	3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
				Jumlah Koleksi Judul Buku Di Perpustakaan
				Jumlah Perpustakaan Di Kota Bandung
6	Dinas Pekerjaan Umum	13	3	Data panjang jalan
				Data panjang jalan dengan kondisi baik
				Data jalan yang memiliki trotoar
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	20	9	Data Penduduk berakses air minum
				Data jumlah daya tampung tempat pemakaman umum
				Data jumlah rumah layak huni
				Data luas pemukiman
				Data jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni
				Data jumlah rumah tangga MBR
				Data luas area permukiman tertata
				Data jumlah rumah di wilayah perkotaan
Data jumlah lingkungan perumahan				
8	Satuan Polisi Pamong Praja	5	4	Data pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP
				Data pelanggaran K3 yang terselesaikan
				Data pelanggaran Perda
				Data penyelesaian penegakkan Perda
9	Dinas Sosial	17	2	Data jumlah PMKS
				Data jumlah panti sosial di Kota Bandung

10	Dinas Tenaga Kerja	20	10	Data jumlah pekerja di Kota Bandung
				Data jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
				Data pendaftar pelatihan berbasis kompetensi
				Data tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
				Data pendaftar pelatihan berbasis masyarakat
				Data tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat
				Data pendaftar pelatihan kewirausahaan
				Data tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
				Data pencari kerja yang terdaftar
				Data pencari kerja yang ditempatkan
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	24	2	Data jumlah KDRT terhadap perempuan
				Data jumlah laporan kekerasan yang masuk ke unit pelayanan terpadu
12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	31	9	Data jumlah pasangan usia subur
				Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kota Bandung
				Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
				Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kota Bandung
				Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
				Data jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi
				Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB
				Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB
				Data Jumlah alat kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang alat kontrasepsi
13	Dinas Perhubungan	14	4	Data jumlah terminal bis
				Data jumlah bandara
				Data jumlah angkutan darat
				Data jumlah pemasangan rambu-rambu
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	1	Data jumlah KIM
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	11	8	Data jumlah atlet yang menang kejuaraan tingkat nasional dan internasional
				Data jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan
				Data jumlah cabang olahraga yang dibina
				Data jumlah cabang olahraga yang terdaftar
				Data jumlah pelatih
				Data jumlah pelatih yang bersertifikat
				Data jumlah seluruh atlet pelajar
Data jumlah atlet pelajar yang dibina				
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	1	Data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	Data rumah ibadah
18	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	4	2	Data jumlah usaha mikro dan kecil
				Data jumlah koperasi di Kota Bandung
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3	1	Data Ekspor Bersih Perdagangan
20	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	2	2	Data jangkauan luas wilayah kebakaran
				Data kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	8	5	Data jumlah anggaran APBD
				Data program dalam APBD yang tidak dilaksanakan
				Data seluruh program dalam APBD
				Data jumlah belanja bidang urusan pendidikan
				Data jumlah belanja bidang urusan kesehatan
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	Data jumlah ijin lokasi
23	Dinas Penataan Ruang	4	0	-
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9	0	-
25	Dinas Pangan dan Pertanian	2	0	-
<b>Jumlah Data Terpenuhi</b>		<b>283</b>	<b>128</b>	

<b>TOTAL JML DATA MENURUT PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017</b>	<b>283</b>
<b>PROSENTASE DATA TERPENUHI (%)</b>	<b>45.23</b>

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2020, indikator “Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka” dibandingkan dengan Tahun 2019, yaitu Tahun 2019 sebanyak 108 data atau 38,16% sedangkan Triwulan 4 tahun 2020 sebanyak 128 data atau 45,23 %.

No	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	38,16% (108 data)	45,23% (128 Data)

#### e. Kinerja Nyata Dengan Akhir Tahun Berjalan

Pada Tahun 2020, indikator “Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka” dibandingkan dengan Akhir Tahun 2020 yaitu pada Tahun 2020 sebanyak 128 data atau 45,23 % dibanding dengan akhir tahun 2020 yaitu 128 data atau 45% (sesuai dengan target tahun 2021 atau 100,52%)

No	URAIAN	Realisasi 2020 TW 4	Akhir Tahun 2020
1	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	45,23% (128 Data)	45% (128 Data)

#### f. Perbandingan Kinerja Dengan Kinerja Instansi Lainnya

Kinerja pada indikator “Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka” dengan kinerja instansi lainnya, tidak dapat disandingkan atau diperbandingkan dengan daerah lain karena tidak memiliki data yang akurat.

#### g. Output program / kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja

Output program/ kegiatan/anggaran serta pernyataan keberhasilan ataupun kegagalan dalam triwulan ini, capaian kinerja “Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka” dapat tercapai dengan baik sesuai dengan rencana dikarenakan dukungan dari perangkat daerah untuk melaporkan data-data yang diperlukan.

Dalam mencapai sasaran program/kegiatan tersebut, Tahun Anggaran 2020 ini dilaksanakan di satu Program, yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah melalui Kegiatan Pengelolaan dan analisa data dengan input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja Sebesar Rp. 116.287.160,- pada di Triwulan 4 terealisasi sebesar Rp. 114.694.000,- atau 98,63%.

#### h. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

faktor-faktor pendukung pada pencapaian kinerja sasaran ini adalah;

- ❖ Dukungan Pemerintah Pusat terhadap Urusan Statistik dalam bentuk Peraturan Perpres tentang Indonesia Satu Data
- ❖ Dukungan dari Instansi Pusat dalam bentuk aplikasi penunjang Urusan Statistik



- ❖ Dukungan Pimpinan Terhadap Pentingnya Pelaksanaan Urusan Statistik.

i. **Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran**

faktor-faktor penghambat dalam mencapai kinerja sasaran ini adalah;

- Inovasi terhadap Aplikasi yang dilakukan Instansi Pusat dan Daerah mengakibatkan sulitnya Integrasi dan Interoperabilitas Data
- SDM perlu dikuatkan pada keahlian Aplikasi Statistik Mutakhir
- SDM perlu dikuatkan pada keahlian menentukan standar klasifikasi, konsep dan definisi dari data yang dikelola.

j. **Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran**

Solusi/ rekomendasi ataupun tindak lanjut pada indikator ini, adalah komitmen dan dukungan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan data/informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga data yang disajikan merupakan data yang update dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali**

a. **Penjelasan umum sasaran dan indikator**

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun

bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif. Meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi deliberatif belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan serimonial.

Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan dari tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Indikator kinerja dihitung berdasarkan Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil verifikasi keamanan aplikasi (Jumlah aplikasi), menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 3} = \frac{\text{Jumlah aplikasi yang aman terkendali}}{\text{Jumlah aplikasi yang diaudit}} \times 100\%$$

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

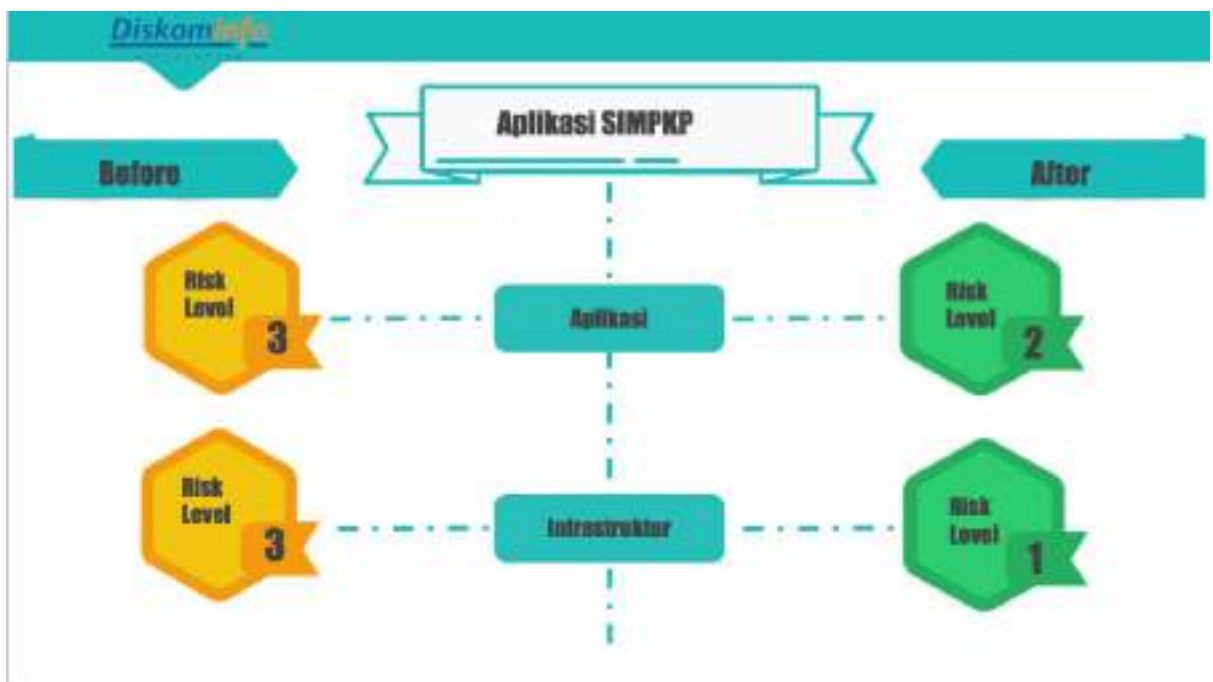
Pada Tahun 2020 dari rencana kerja Jumlah PD yang menindaklanjuti hasil verifikasi keamanan aplikasi 10 aplikasi (62,50 %) terealisasi sejumlah 10 aplikasi atau 62,50 % Jumlah PD yang menindaklanjuti hasil verifikasi keamanan aplikasi.

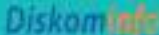
No	URAIAN	Rencana 2020	Realisasi 2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali terbuka	62,50% (10 aplikasi)	62,50% (10 aplikasi)

Capaian indikator kerja nyata terhadap indikator target Renstra Diskominfo Tahun 2020 didapat ; 62,50% (10 aplikasi)/ 62,50% (10 aplikasi) = 100% **(Sesuai target Tahun 2020)**.

Aplikasi yang diaudit keamanannya ;

1. Aplikasi e-SIMPKP Prodekbang







Before

Error Stacktrace

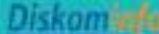
After



Terdapat error berupa stacktrace pada aplikasi simpkp sebelum dilakukan perbaikan pada aplikasi.




Error stacktrace telah dilakukan perbaikan dan telah dilakukan redirect ke halaman 404 not found, jika halaman yang diakses tidak ditemukan.




Before

Clickjacking

After



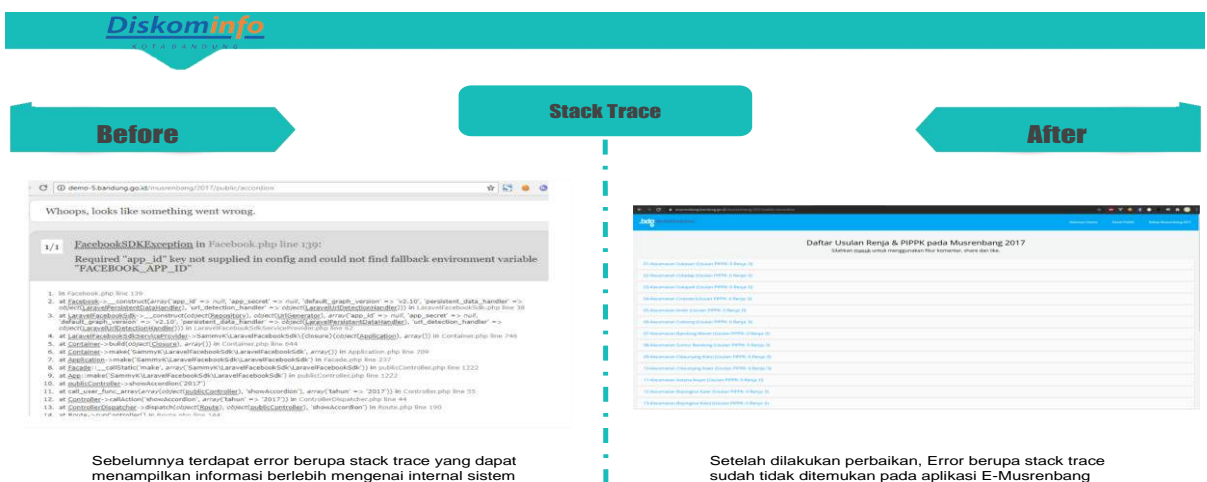
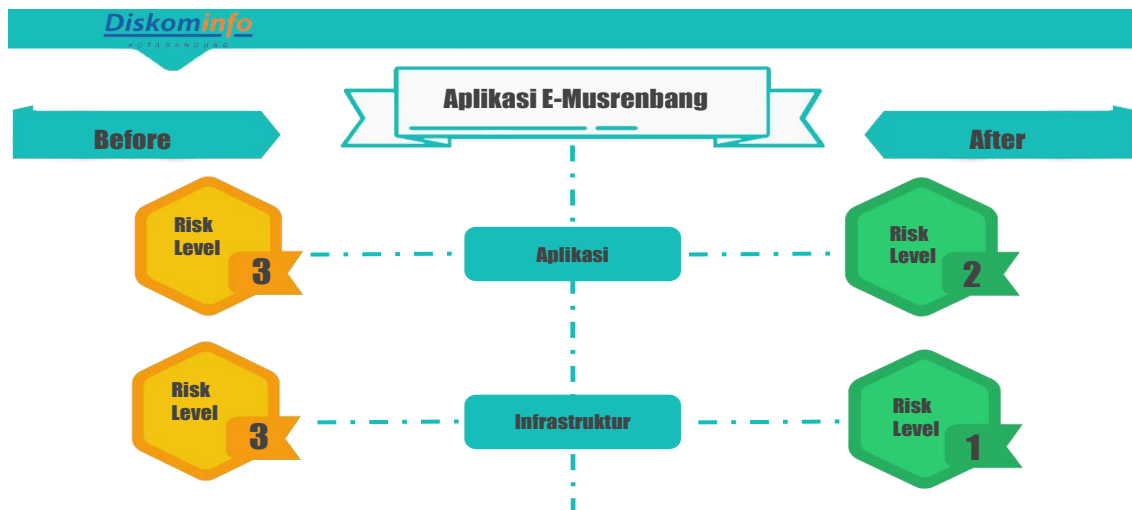
Sebelum nya terdapat vulnerability berupa clickjacking pada aplikasi SMPKP seperti ditunjukkan pada gambar diatas.



Setelah dilakukan perbaikan, clickjacking sudah tidak dapat dilakukan kembali dan hanya menampilkan halaman putih seperti pada gambar diatas.



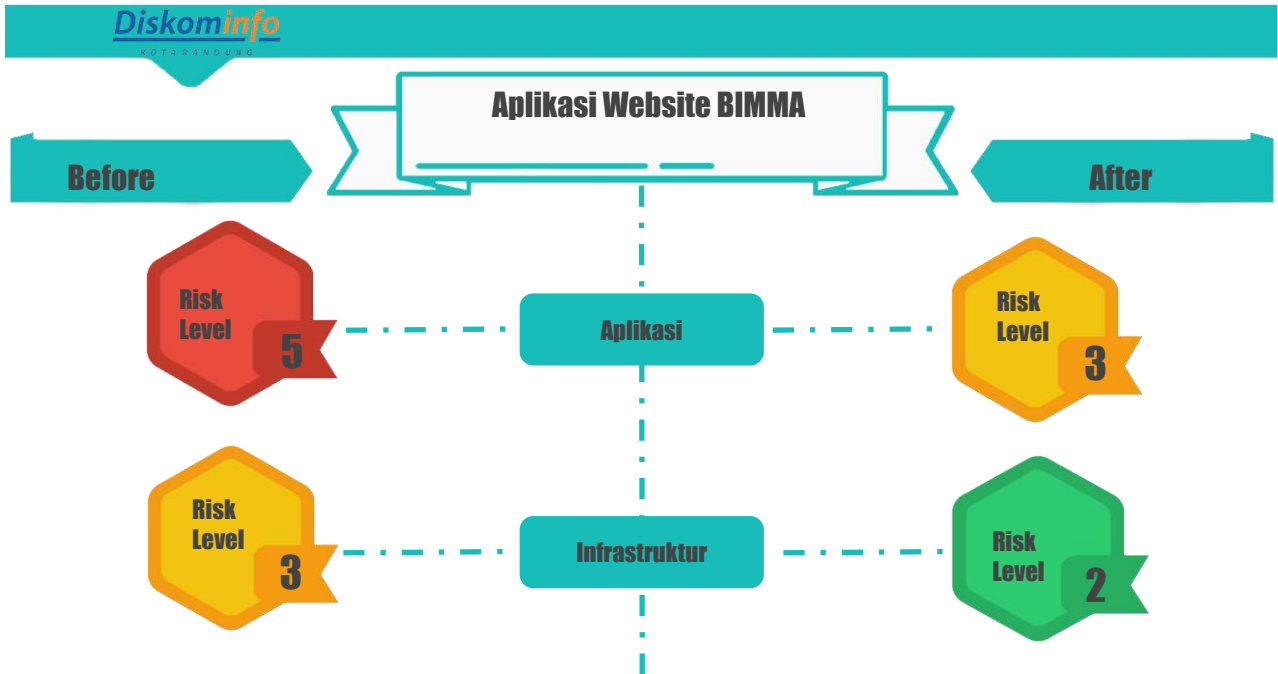
## 2. Aplikasi e-musrenbang



Sebelumnya terdapat error berupa stack trace yang dapat menampilkan informasi berlebih mengenai internal sistem

Setelah dilakukan perbaikan, Error berupa stack trace sudah tidak ditemukan pada aplikasi E-Musrenbang

### 3. Aplikasi BIMMA



This section illustrates the results of an SQL Injection test on the BIMMA website. It is divided into 'Before' and 'After' states, with the test method labeled as 'SQL Injection'.

**Before State:** A terminal screenshot shows the results of a successful SQL injection attack. The output lists available databases:
 

```

    [10:45:52] [INFO] used SQL query returns 6 entries
    [10:45:52] [INFO] retrieved: information_schema
    [10:45:52] [INFO] retrieved: c1bursakerja
    [10:45:52] [INFO] retrieved: c1bursakerja_sms
    [10:45:52] [INFO] retrieved: c1disnaker_web
    [10:45:52] [INFO] retrieved: c1registrasi
    [10:45:52] [INFO] retrieved: c1wajib_lapor
    available databases [6]:
    [*] c1bursakerja
    [*] c1bursakerja_sms
    [*] c1disnaker_web
    [*] c1registrasi
    [*] c1wajib_lapor
    [*] information_schema
    
```

 A blue callout box points to this list with the text: "Daftar database yang berhasil di-enumerasi".

**After State:** A screenshot of the website dashboard shows a successful security patch. The dashboard displays a value of 3,425 and various charts. A caption below reads: "Hasil tes ulang celah keamanan SQL Injection pada Website BIMMA setelah dilakukan perbaikan form telah dihilangkan..".

**Text Summary:** Terdapat celah keamanan berupa SQL Injection pada Website BIMMA.

**Diskominfo**  
KOTA BANDUNG

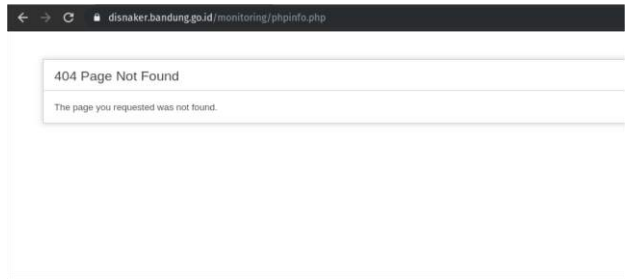
**Before**

**Fingerprint Web App**

**After**



Sebelumnya terdapat fingerprint web app yang memberikan informasi berlebih mengenai server



Setelah dilakukan perbaikan fingerprint web app tidak dapat diakses di aplikasi BIMMA

**Diskominfo**  
KOTA BANDUNG

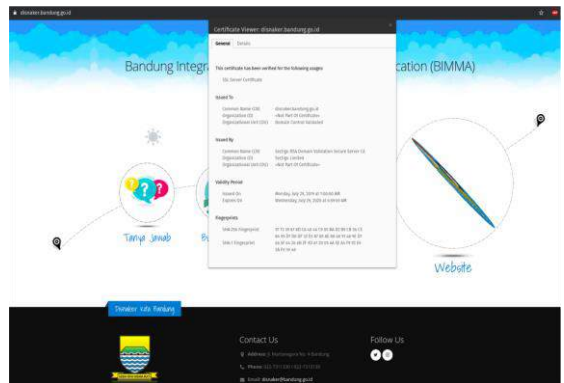
**Before**

**SSL**

**After**



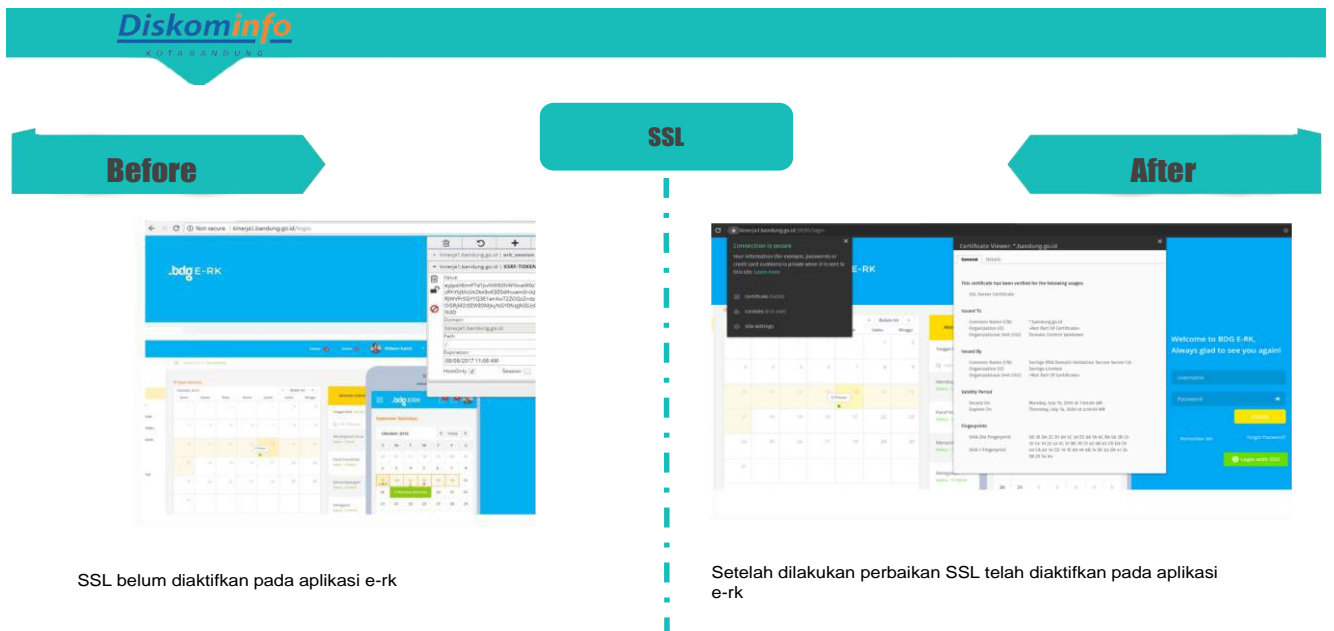
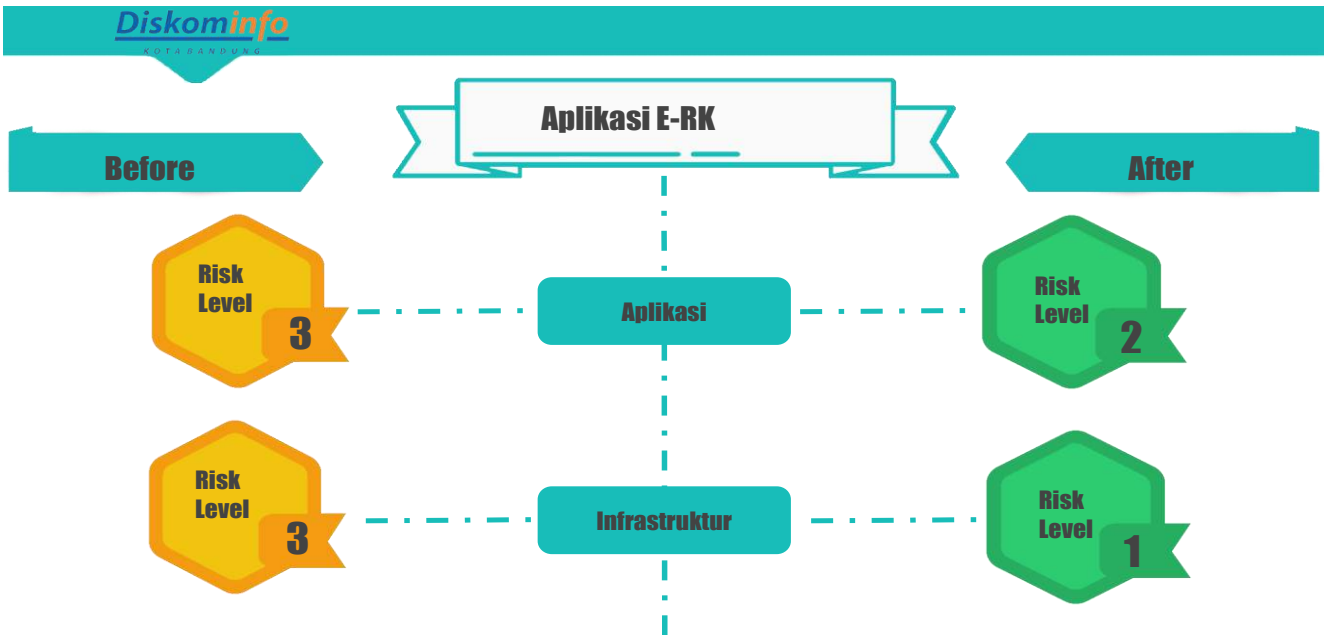
Sebelumnya SSL belum diaktifkan pada Aplikasi BIMMA

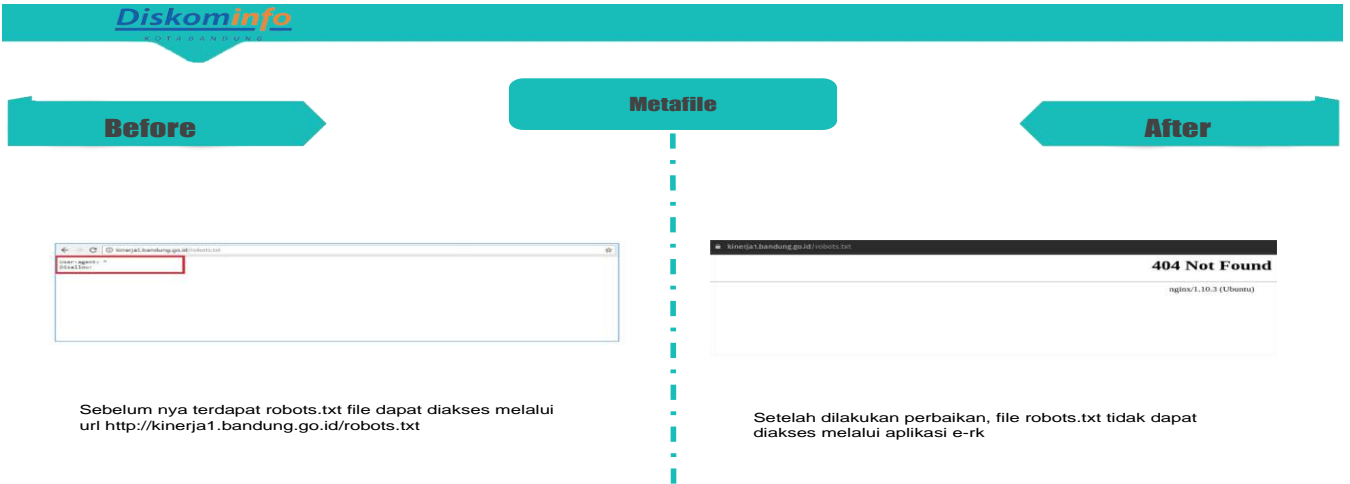


SSL telah diaktifkan pada aplikasi BIMMA dan dapat terlihat pada gambar berikut

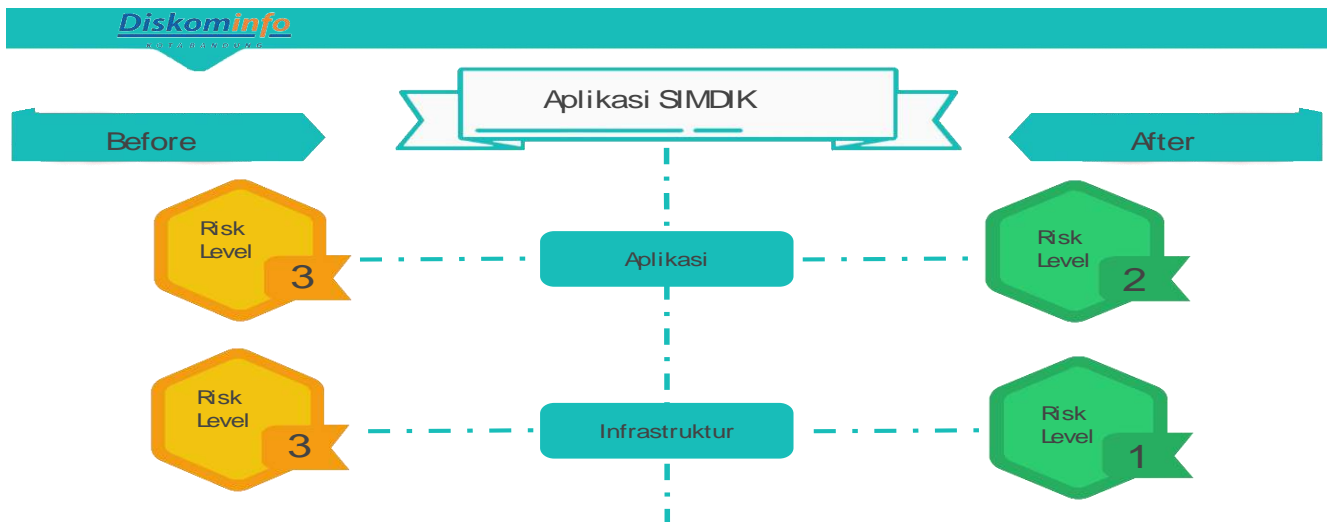


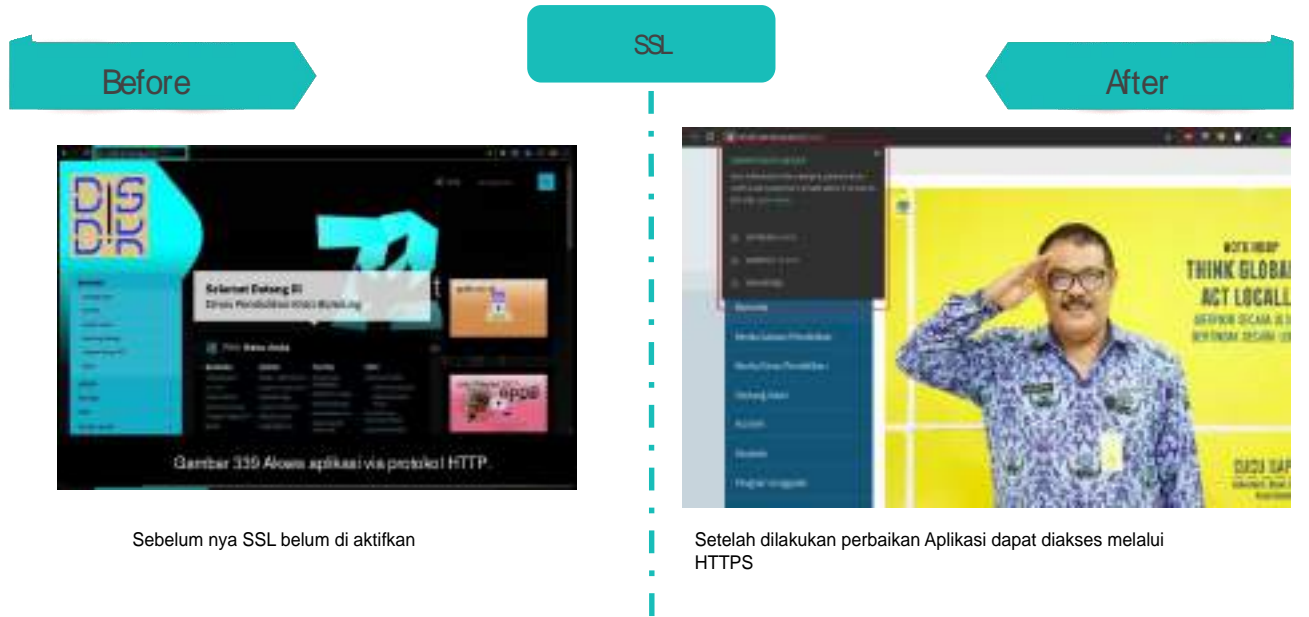
4. Aplikasi e-rk



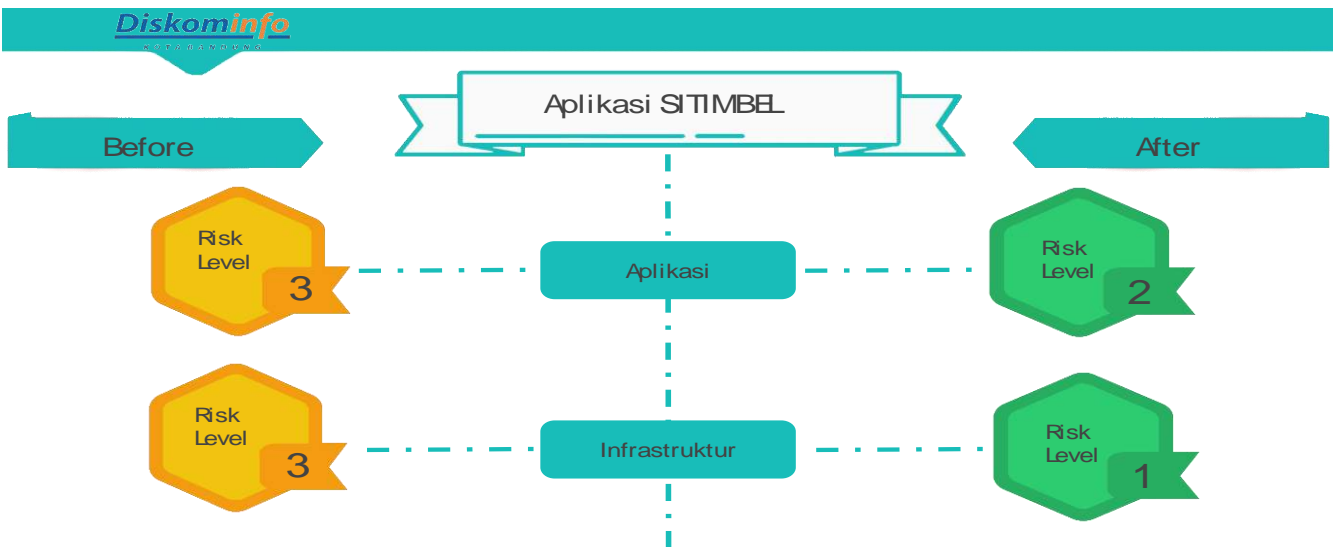


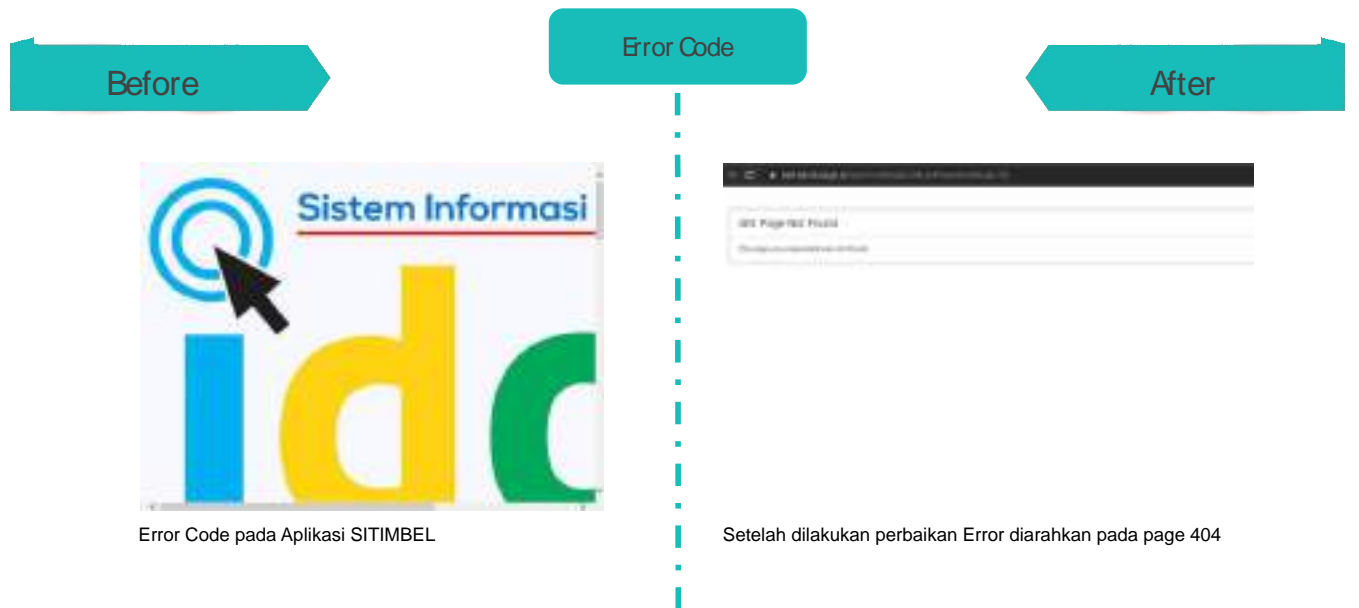
### 5. Aplikasi SIMDIK



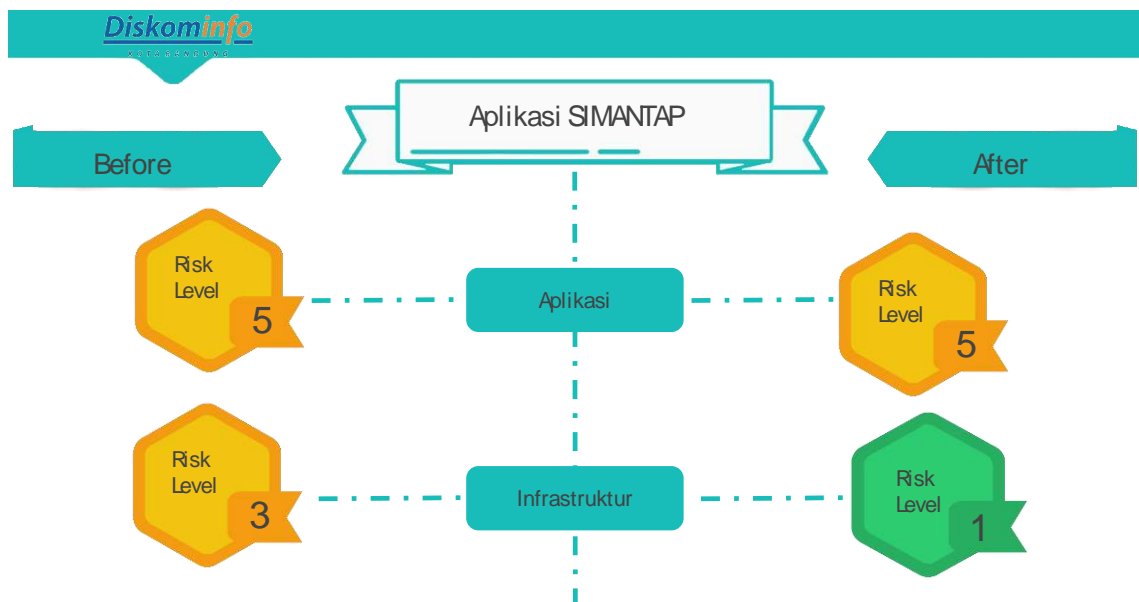


### 6. Aplikasi SITIMBEL

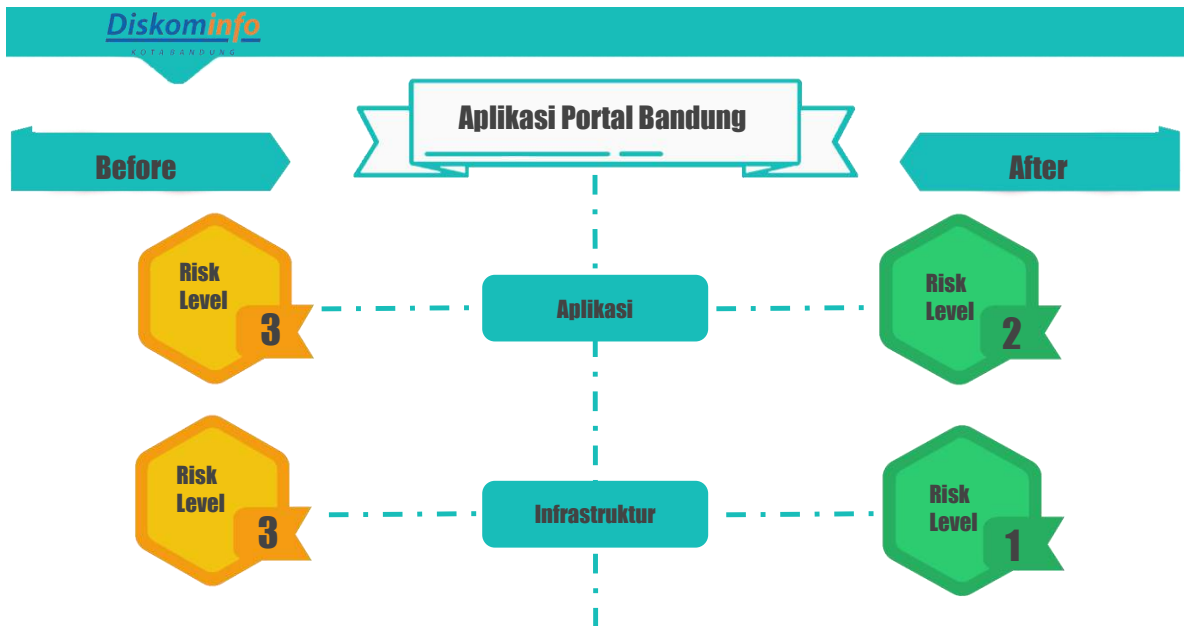




### 7. Aplikasi SIMANTAP



### 8. Portal Bandung



**Before**

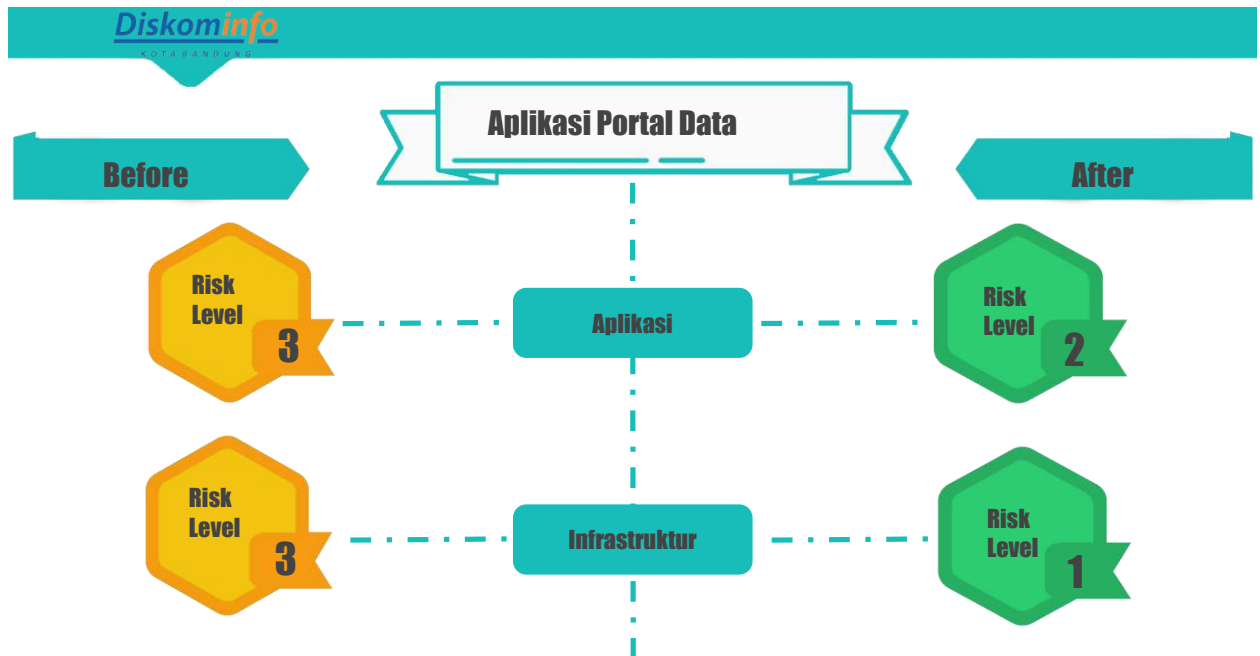
Sebelum dilakukan perbaikan terdapat celah keamanan Clickjacking, dikarenakan X-Frame aktif pada web server.

**Clickjacking**

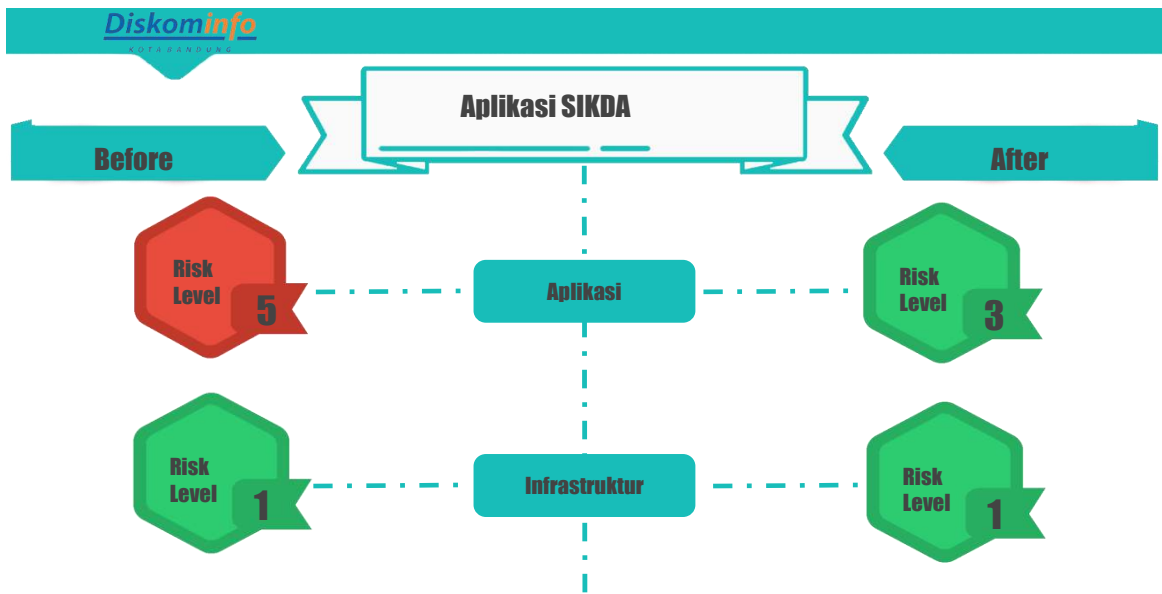
**After**

Setelah dilakukan perbaikan, dan menonaktifkan x-frame option pada web server, clickjacking sudah tidak dapat dilakukan.

9. Portal Data



10. SIKDA



**Before** **Clickjacking** **After**

Sebelum perbaikan terdapat celah keamanan Clickjacking yang dapat dilakukan pada aplikasi SIKDA

Setelah dilakukan Perbaikan celah keamanan clickjacking sudah tidak dapat dilakukan.

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2020, indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali” dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 10 aplikasi (46,87%) dan Tahun 2020 sebesar 10 aplikasi (62,50%); dapat dihasilkan  $46,87/62,50 = 133,35\%$

No	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	46,87% (10 aplikasi)	62,50 % (10 aplikasi)

e. Kinerja Nyata Dengan Akhir Tahun Berjalan

Pada Tahun 2020, indikator “Jumlah PD yang menindaklanjuti hasil verifikasi keamanan aplikasi (Jumlah aplikasi)” sebanyak 62,50% atau 10 aplikasi dibandingkan dengan Akhir Tahun 2020 yaitu sebanyak 10 aplikasi atau 62,50 %.

No	URAIAN	Realisasi 2020	Akhir Tahun 2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	62,50 % (10 aplikasi)	62,50 % (10 aplikasi)



f. **Perbandingan Kinerja Dengan Kinerja Instansi Lainnya**

Kinerja pada indikator per triwulan yaitu “Jumlah PD yang menindaklanjuti hasil verifikasi keamanan aplikasi (Jumlah aplikasi)” dengan kinerja instansi lainnya, tidak dapat disandingkan atau diperbandingkan dengan daerah lain karena tidak memiliki data yang akurat.

g. **Output program / kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja**

Output program/ kegiatan/anggaran serta pernyataan keberhasilan ataupun kegagalan dalam Tahun 2020 tidak dapat diukur dengan membandingkan Tahun 2018 karena belum menjadi indikator.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan di 1 Program, yaitu Program Optimalisasi Persandian melalui Kegiatan Keamanan Informasi dengan input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja dalam program ini Sebesar Rp.105.700.000,- di Triwulan 4 terealisasi sebesar Rp. 96.730.258,- atau 91,51%.

h. **Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran**

Faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2020 pada indikator “Jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian yang terkendali” , yaitu ;

- ◆ **KEBIJAKAN PIMPINAN** : Komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan untuk berupaya mewujudkan *Bandung Smart City* dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) dimana bidang persandian dan aplikasi sebagai lini terdepan dalam penerapan aplikasi.
- ◆ **INTEGRASI APLIKASI** : Integrasi penerapan aplikasi sudah berjalan dengan baik, dan menjadikan kinerja pemerintahan lebih efektif dan

efisien. contoh: Integrasi aplikasi SIMPEG dan SIAP dengan ERK dalam peningkatan disiplin dan kinerja ASN Kota Bandung.

- ◆ ANGGARAN : Alokasi anggaran yang cukup memadai untuk pembangunan dan pengembangan sistem IT.
- ◆ TENAGA AHLI/KONSULTAN : Menggunakan jasa tenaga ahli/konsultan perorangan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja di bidang Persandian.


#### i. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran




faktor-faktor penghambat dalam mencapai kinerja sasaran ini adalah;

- SUMBER DAYA MANUSIA : Kurangnya kompetensi sdm, terutama ASN dibidang IT (ahli IT dan JFT sandiman yang professional) menjadikan bidang Persandian belum begitu berkembang.
- KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA : Perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola administrasi/ SOP dari bidang Persandian sejalan dgn perkembangan IT dan penerapan sistem e-Government guna mengimbangi antara kemampuan dan kebutuhan dilapangan.
- SECURITY AWARENESS YANG RENDAH : Kesadaran yang rendah akan pemahaman aplikasi dan pengamanan data/informasi dikarenakan ketidaktahuan/ kepedulian dalam mengelola/pengamanan data informasi.

#### j. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Berdasarkan hasil audit keamanan aplikasi pada Tahun 2020 adalah ;

. Aplikasi SIMPKP:

- A7 Missing Function Level Access Control 
- A6 Sensitive Data Exposure 
- A5 Security Misconfiguration 

Solusi/rekomendasi temuan celah keamanan

(vulnerability) pada aplikasi SIMPKP telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 2 yang berarti ada masalah keamanan yang sifatnya minor, dampak terhadap organisasi tidak terasa. [L]  
[SEP]

## 2. aplikasi E-MUSRENBANG:

- A6 Sensitive Data Exposure [L]  
[SEP]
- A5 Security Misconfiguration [L]  
[SEP]

Solusi/rekomendasi temuan celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi E- MUSRENBANG telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 2 yang berarti ada masalah keamanan yang sifatnya minor, dampak terhadap organisasi tidak terasa. [L]  
[SEP]

## 3. aplikasi aplikasi BIMMA:

- A1 Injection [L]  
[SEP]
- A6 Sensitive Data Exposure [L]  
[SEP]
- A5 Security Misconfiguration [L]  
[SEP]
- A7 Missing Function Level Access Control [L]  
[SEP]

Solusi/rekomendasi temuan celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi BIMMA telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan yang sebelumnya memiliki nilai 5 turun menjadi 3 yang berarti sebelumnya masalah keamanan aplikasi yang sangat besar dan berdampak kepada organisasi diturunkan menjadi masalah keamanan

aplikasi yang impaknya sudah terasa, tapi dampak terhadap organisasi tidak terasa [L][S][EP]

#### 4. Aplikasi aplikasi E-RK:

- A6 Sensitive Data Exposure [L][S][EP]
- A5 Security Misconfiguration [L][S][EP]
- Improper Error Handling [L][S][EP]

Solusi/rekomendasi temuan celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi E-RK telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 2 yang berarti ada masalah keamanan aplikasi yang sifatnya minor, dampak terhadap organisasi tidak terasa. [L][S][EP]

#### 5. Hasil temuan celah keamanan pada aplikasi SIMDIK:

- A1 Injection [L][S][EP]
- A2 Broken Authentication and Session Management [L][S][EP]
- A5 Security Misconfiguration [L][S][EP]
- Password Management

Analisis Tindak Lanjut / Perbaikan [L][S][EP] Temuan celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi SIMDIK telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 2 yang berarti ada masalah keamanan yang sifatnya minor, dampak terhadap organisasi tidak terasa [L][S][EP]

#### 6. Hasil temuan celah keamanan pada aplikasi SITIMBEL:

- A1 Injection [L][SEP]
- A3 Cross-Site Scripting [L][SEP].

Analisis Tindak Lanjut / Perbaikan [L][SEP] Temuan celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi SITIMBEL telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 2 yang berarti ada masalah keamanan yang sifatnya minor, dampak terhadap organisasi tidak terasa. [L][SEP]

#### 7. Hasil temuan celah keamanan pada aplikasi SIMANTAP:

- A1 Injection [L][SEP]
- A2 Broken Authentication and Session Management [L][SEP]
- A5 Security Misconfiguration [L][SEP].
- A6 Sensitive Data Exposure [L][SEP]
- A7 Missing Function Level Access Control [L][SEP]
- Password Management

Analisis Tindak Lanjut / Perbaikan [L][SEP] Temuan celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi SIMANTAP telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan pada infrastruktur yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 1 yang berarti tidak ditemukan masalah keamanan. Sedangkan celah pada aplikasi tingkat resiko masih 5 dikarenakan cukup sulit karena harus merubah sumber kode (source code) dengan menambah parameter untuk tidak mengeksekusi perintah SQL. [L][SEP]

8. Hasil temuan celah keamanan pada aplikasi PORTAL BANDUNG:

- A2 Broken Authentication Session [L][SEP]
- A5 Security Misconfiguration [L][SEP]
- Information Leakage [L][SEP]
- Password Management [L][SEP]

Analisis Tindak Lanjut / Perbaikan [L][SEP] Temuan celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi PORTAL BANDUNG telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan pada infrastruktur yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 1 yang berarti tidak ditemukan masalah keamanan. Sedangkan celah pada aplikasi tingkat resiko yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 2 yang berarti ada masalah keamanan yang sifatnya minor, dampak terhadap organisasi tidak terasa. [L][SEP]

9. Aplikasi PORTAL DATA memiliki tingkat resiko keamanan bernilai 3 yang berarti ada masalah keamanan aplikasi yang sudah mulai terasa dampaknya apabila tidak ditangani. Berikut hasil temuan celah keamanan pada aplikasi PORTAL DATA:

- A6 Sensitive Data Exposure

Analisis Tindak Lanjut / Perbaikan [L][SEP] Temuan celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi PORTAL DATA telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan pada infrastruktur yang sebelumnya memiliki nilai 3 turun menjadi 1 yang berarti tidak ditemukan masalah keamanan. Sedangkan celah pada aplikasi tingkat resiko yang sebelumnya memiliki nilai 3

turun menjadi 2 yang berarti ada masalah keamanan yang sifatnya minor, dampak terhadap organisasi tidak terasa

10. Ditemukan 10 celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi SIKDA. Berdasarkan hasil analisis temuan tersebut, aplikasi SIKDA memiliki tingkat resiko keamanan bernilai 5 yang berarti ada masalah keamanan aplikasi yang besar dan berdampak apabila tidak ditangani. Berikut hasil temuan celah keamanan pada aplikasi SIKDA:

- A1 Injection [L][SEP]
- A2 Broken Authentication Session [L][SEP]
- A5 Security Misconfiguration [L][SEP]
- A6 Sensitive Data Exposure [L][SEP]

Analisis Tindak Lanjut / Perbaikan [L][SEP] Temuan celah keamanan (vulnerability) ada aplikasi SIKDA telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa celah keamanan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, tingkat resiko keamanan pada infrastruktur yang sebelumnya memiliki nilai 1 tetap menjadi 1 yang berarti tidak ditemukan masalah keamanan. Sedangkan celah pada aplikasi tingkat resiko yang sebelumnya memiliki nilai 5 turun menjadi 3 yang berarti ada masalah keamanan aplikasi yang sudah mulai terasa dampaknya apabila tidak ditangani.

#### **4. Indeks Kepuasan Masyarakat.**

##### **a. Penjelasan umum sasaran dan indikator**

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Permen PANRB No.14 Tahun

2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Sinambela, 2010, hal : 5). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut memuaskan (Lupiyoadi, 2001, hal: 148).

Dalam kenyataannya pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, diperlukan Reformasi Pelayanan Publik, (Sinambela, 2010, hal : 5) menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan itu diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permenpan nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu sasaran dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Pengukuran capaian indikator 4 dilakukan dengan melihat data total jumlah responden masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung . Adapun layanan yang diberikan mulai dari ;

1. Persyaratan Pelayanan yang Diberikan Sudah Sesuai
2. Prosedur Pelayanan yang Diberikan Mudah
3. Waktu Pelayanan yang Diberikan Tepat Sesuai SOP
4. Produk Layanan Sesuai dengan yang Diminta
5. Kemampuan Petugas dalam Memberikan Pelayanan Memadai
6. Pelayanan yang Telah Diberikan Memuaskan
7. Petugas yang Memberikan Pelayanan Ramah
8. Produk Layanan yang Dijanjikan Diberikan Tepat Waktu
9. Tindak Lanjut Pengaduan/Layanan Memuaskan

Dengan menggunakan formulasi perhitungan:

#### **Capaian indikator 4**

= **Berdasarkan hasil survai pelayanan Diskominfo terhadap masyarakat**

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Pada Tahun 2020, indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 79 poin terealisasi sebesar 84,72 poin atau 107,24% (melebihi target yang telah ditentukan).

No	URAIAN	Rencana 2020	Realisasi 2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	84,72 poin



## Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika  
2020

*Diskominfo*

### DASAR HUKUM

KEPUTUSAN MENPAN  
KEP/25/M.PAN/2/2004  
TENTANG PEDOMAN  
UMUM PENYUSUNAN IKM  
UNIT PELAYANAN  
INSTANSI PEMERINTAH



PERMENPANRB NO.14  
TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN SURVEI  
KEPUASAN MASYARAKAT  
UNIT PENYELENGGARA  
PELAYANAN PUBLIK

*Diskominfo*

Analisa IKM

**ANALISIS INDEKS KEPuasan MASYARAKAT (IKM)**  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Kota Bandung  
TAHUN 2020

	NILAI PERINGKAT/PLASIRANG									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Jumlah Masyarakat	11	8	11	14	14	12	11	10	10	11
IKM Perorangan	3,28	3,30	3,29	3,30	3,30	3,28	3,29	3,28	3,28	3,29
IKM Perseorangan Perorangan	3,281	3,301	3,291	3,299	3,299	3,281	3,291	3,281	3,281	3,291
IKM (rata-rata)	<b>3.39</b>									
IKM (rata-rata) Perorangan	<b>84.72</b>									
Nilai Perorangan	<b>B</b>									



Hasil Survey

**HASIL SURVEY INDEKS KEPuasan MASYARAKAT**  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Kota Bandung TAHUN 2020

No. Responden	NILAI PERINGKAT/PLASIRANG									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0001	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Masyarakat	11	8	11	14	14	12	11	10	10	11
IKM Perorangan	3,28	3,30	3,29	3,30	3,30	3,28	3,29	3,28	3,28	3,29
IKM Perseorangan Perorangan	3,281	3,301	3,291	3,299	3,299	3,281	3,291	3,281	3,281	3,291
Rata-rata	<b>3.39</b>									
IKM (rata-rata) Perorangan	<b>84.72</b>									
Nilai Perorangan	<b>B</b>									
Responden Perorangan	<b>100%</b>									



## DAFTAR PERTANYAAN



Unsur	Pertanyaan IKM Diskominfo	Penjelasan PermenpanRB No. 14 thn 2017
Persyaratan	Persyaratan yang Harus Dipenuhi dari Pelayanan Mudah	Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Prosedur Pelayanan yang Diberikan Mudah	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
Waktu Penyelesaian	Produk Layanan Diberikan Tepat Waktu	Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
Biaya/Tarif	Biaya untuk Mendapatkan Layanan Tidak Memberatkan	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Produk Layanan Sesuai dengan yang Diminta	Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Kompetensi Pelaksana	Kemampuan Petugas dalam Memberikan Pelayanan Memadai	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
Perilaku Pelaksana	Petugas yang Memberikan Pelayanan Ramah	Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan Saran dan Masukan Sudah Baik	Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Layanan Memuaskan	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama diselenggarakannya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Capaian kinerja pada Tahun 2020 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019 yaitu pada Tahun 2020 berdasarkan hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh sebesar 84,72 Poin bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 79,94 Poin.

No	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,94 poin	84,72 poin

#### e. Kinerja Nyata Dengan Akhir Tahun Berjalan

Capaian kinerja Triwulan 4 pada Tahun 2020 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja akhir tahun berjalan Tahun 2020 yaitu realisasi Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar 84,72 poin bila disandingkan dengan data akhir tahun berjalan yaitu sebesar 79 Poin atau 107,24%.

No	URAIAN	Realisasi 2020	Akhir Tahun 2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,72 Poin	79 Poin

f. Perbandingan Kinerja Dengan Kinerja Instansi Lainnya

Kinerja pada indikator per triwulan yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan kinerja instansi lainnya, tidak dapat disandingkan atau diperbandingkan dengan daerah lain karena tidak memiliki data yang akurat

g. Output program / kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja

Output dari indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” ini adalah: Hasil survai berdasarkan pertanyaan kepada masyarakat atas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun berjalan.

Dalam mencapai sasaran program/kegiatan tersebut, Tahun Anggaran 2020 ini dilaksanakan di Program, yaitu Program Layanan Informasi Publik melalui Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik sebesar Rp. 691.630.100,- terealisasi Rp. 671.720,100,- atau 97,12% dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja Sebesar Rp. 137.346.000,- di Triwulan 4 terealisasi sebesar Rp. 114.631.052,- atau 83,46%. anggaran tersebut sebagian besar merupakan anggaran kegiatan rutin untuk cetakan dinas.

h. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Tahun 2020 ini, yaitu;

1. Dukungan dari tim survai Indeks Kepuasan Masyarakat yang terpadu;
2. Adanya data survai dari masyarakat melalui web diskominfo dan isian yang disediakan oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan diskominfo;
3. Adanya dukungan IT yang mumpuni dalam pelaksanaan survai dan kelancaran dalam pelaksanaan survai.

i. **Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran**

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat ” pada Tahun 2020, faktor penghambat dalam pelaksanaan survai yaitu; Pemahaman masyarakat dalam produk pelayanan Diskominfo khususnya kewenangan antara pusat dan daerah;

j. **Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran**

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami dapat memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari, yaitu memberikan pemahaman tugas dan pokok diskominfo sesuai dengan peraturan yang ada, karena kewenangan pusat seperti; pelayanan untuk memblokir situs yang bersifat negatif.

Pemahaman kepada masyarakat itu ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan internet bersifat bijak kepada sekolah-sekolah maupun kepada orang tua murid untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan browsing di internet.

## PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

Perbandingan kinerja dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja kedepannya. Perbandingan kinerja Tahun 2020 terhadap target Tahun 2018. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan baik capaian kinerja maupun presentase kinerja.

### 1. Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Perbandingan kinerja dapat dilihat pada Tabel 6. Sedangkan perbandingan persentase kinerja dapat di lihat pada Tabel 7.

TABEL 6. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2020

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian									
			2019		2020							
					TW1		TW2		TW3		TW4	
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,0	3,11	-	-	-	-	-	-	3,01	3,78
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	Prosentase	35% (100 data)	38,16% (108 data)	39% (111 data)	39,22% (111 data)	41% (117 data)	41,34% (117 data)	43% (122data)	43,11% (122 data)	45% (128 data)	45,23% (128 data)
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	Prosentase	46,87% (10 aplikasi)	46,87% (10 aplikasi)	48,11 % (1 aplikasi)	48,11 % (1 aplikasi)	53,13 % (4 aplikasi)	53,13 % (4 aplikasi)	57,81% (7 aplikasi)	57,81% (7 aplikasi)	62,50% (10 aplikasi)	62,50% (10 aplikasi)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	76 Poin	79,94 Poin	-	-	-	-	-	-	79 Poin	84,72 Poin

Keterangan:

T: Target C: Capaian



TABEL 7. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2019, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2019	2020			
				TW1	TW2	TW3	TW4
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	104%				125%
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	Prosentase	109%	100%	100%	100,26%	100%
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	105%				107%

Di Tabel 13, kita dapat melihat peta capaian kinerja Tahun 2020. Pada Tahun 2020 terlihat beberapa indikator sasaran berwarna hijau menunjukkan capaian yang tepat memenuhi target yang didefinisikan di Renstra Diskominfo 2018-2023, dan yang berwarna biru menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target, yang di definisikan di RESTRA Diskominfo 2018-2023.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2018-2023

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Renstra 2018-2023, maka data capaian dan presentase kinerja pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 perlu dibandingkan, namun karena Tahun 2018 belum termasuk indicator maka tidak dapat dibanding karena masih Renstra 2013-2018.

Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaiannya Renstra, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Renstra, maupun untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Bandung secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* dari SKPD, dalam hal ini, Diskominfo Kota Bandung. Untuk Tahun 2020 IKU Diskominfo sudah berubah sesuai dengan Renstra Diskominfo Tahun 2019-2023.

TABEL 8. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capai Akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja					Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE (smart city)	Poin	3,04	3,11	3,78	-	-	-	Target Tahun 2020 sebesar 3,01 Poin
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	Prosentase	75%	38,16 % (100 data)	45,23% (128 data)	-	-	-	Target Tahun 2020 sebesar 45%
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	Prosentase	100%	46,87% (10 aplikasi)	62,50% (10 aplikasi)	-	-	-	Target Tahun 2020 sebesar 62,50%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88,31	79,94	84,72 Poin	-	-	-	Target Tahun 2020 sebesar 79 Poin

**TABEL 9. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capai Akhir Renstra (2023)	Prosentase Capaian Kinerja					Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE (smart city)	Poin	3,04	102,3%	124%	-	-	-	Target Tahun 2020 sebesar 3,01 Poin
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	Prosentase	75%	50,9 %	60,31%	-	-	-	Target Tahun 2020 sebesar 45%
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	Prosentase	100%	46,9%	62,50%	-	-	-	Target Tahun 2020 sebesar 62,50%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88,31	90,53%	95,94%	-	-	-	Target Tahun 2020 sebesar 79 Poin

Dari Tabel 8 dan Tabel 9 terlihat bahwa realisasi indikator 1 telah melebihi target akhir renstra yaitu target akhir sebesar 3,04 Poin pada Tahun 2020 mendapat penilaian sebesar 3,11 Poin atau sebesar 102,3 % dari target renstra dan Pada tahun 2020 sebesar 124%; Indikator 2; capaian kinerja sampai Tahun 2020 sebesar 50,9% dari target akhir renstra sebesar 75%, dan tahun 2020 sebesar 60,31% Indikator 3; capaian kinerja sampai tahun 2020 sebesar 46,9% dari target 100% pada akhir renstra dan Pada tahun 2020 sebesar 62,50% serta Indikator 4; realisasi kinerja pada Tahun 2020 sebesar 89,91 Poin dari target sebesar 88,31 poin atau 90,53% dan tahun 2020 sebesar 84,72 poin atau 95,94% .

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa 4 indikator yang telah melebihi target yaitu sebanyak 1 indikator yaitu Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE (smart city) dari target akhir renstra sebesar 3,04 poin terealisasi pada Tahun 2020 sebesar 3,11 poin dan Pada tahun 2020 sebesar 124%, sedangkan 3 indikator masih dalam proses menuju target akhir renstra.

## ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah melakukan berbagai efisiensi antara lain;

- c. Mengoptimalkan Sumber daya Manusia (SDM);
- d. Sarana dan prasarana kerja seperti; penggunaan AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja selesai langsung dimatikan;
- e. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;

Sedangkan penunjang pencapaian kinerja dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, yaitu sebagai berikut;

TABEL 9. TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN

**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Periode 2019 - 2023  
Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	1.1 Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	Indeks	3,01	3,78	125	1	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	288.107.500	279.515.000	97.02
							2	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.138.359.800	7.941.446.225	86.9
							3	Diseminasi Informasi	1.267.378.700	1.241.292.900	97.94
							4	Optimalisasi Aplikasi	4.301.398.000	2.917.390.520	67.82
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 42.44 %											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 151.41 %											
2	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawabkan/kredibel	2.1 Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	%	45	45,23	100	5	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	561.494.660	540.001.500	96.17
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 3.83 %											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 103.98 %											

3	Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah	3.1	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	%	62,50	62,50	100	6	Optimalisasi Persandian	105.700.000	96.730.258	91.51
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						100	TOTAL PER SASARAN	105.700.000	96.730.258	91.51
TINGKAT EFISIENSI 8.49 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 109.27 %												
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79	87,72	107	7	Layanan Informasi Publik	691.630.100	671.720.100	97.12
								8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.123.244.700	1.836.276.664	86.48
								9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339.700.000	337.656.110	99.4
								10	Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0
								11	Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat daerah	85.442.500	55.550.000	65.01
								12	Perlindungan Sosial Bencana	1.154.353.500	1.053.151.000	91.23
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				
TINGKAT EFISIENSI 17.01 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 118,93												
								TOTAL KESELURUHAN	20.056.809.460	16.970.730.277	84.61	

Dalam upaya pelaksanaan kinerja yang didukung oleh adanya anggaran dapat dilihat dari Tabel 9. Ini, yaitu sasaran 1. Tingkat efisiensi sebesar 42,44% sedangkan tingkat efektifitasnya sebesar 151,41%; Sasaran 2. Tingkat efisiensi sebesar 3,83% dan tingkat efektifitasnya mencapai 103,98%; Sasaran 3. Tingkat efisiensi sebesar 8,49% sedangkan tingkat efektifitasnya sebesar 109,27% dan Sasaran 4. Tingkat efisiensi sebesar 17,01% sedangkan tingkat efektifitasnya sebesar 118,91%. Melihat dari data tersebut rata-rata dari capaian kinerja tingkat efektifnya di atas 100%.



## BAB IV

### PENUTUP

**L**KIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai.

Sasaran Pertama Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city) dengan target 3,01 poin terealisasi 3,78 poin (125,59%) atau melebihi target yang telah ditentukan.

Sasaran Kedua yaitu Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dari target 45 % terealisasi sebesar 45,23% (128 data) atau sesuai target yang telah ditentukan.

Sasaran Ketiga yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali dengan target 62,50 % terealisasi sebesar 62,50 % (10 aplikasi) atau sesuai dengan target.

Sasaran Keempat yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 79 poin terealisasi 84,72 poin atau melebihi target yang ditentukan.



Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 30 Desember 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19731127 199303 1 003**